

**Analisis Dampak Kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* Terhadap Peningkatan Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020-2023**

*“Analysis of the Impact of the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) on the Improvement of Indonesia's International Political Economy in 2020-2023”*



**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**SITTY MAISYARO KALAUW**

**NIM. 146420121006**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS DAMPAK KERJASAMA INDONESIA-KOREA  
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)  
TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL  
INDONESIA TAHUN 2020-2023**

Nama : Sitty Maisyaro Kalauw

NIM : 146420121006

Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada 07 Juli 2025

Pembimbing I

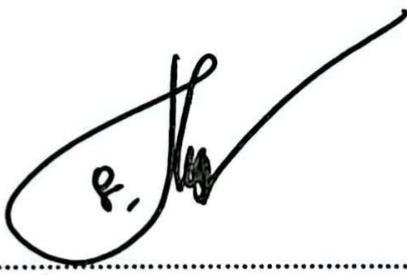
Nurinaya, M.H.I.  
NIDN. 1417129501



(.....)

Pembimbing II

Etik Siswatiningrum, S.IP., M.H.I  
NIDN. 1409018401



(.....)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS DAMPAK KERJASAMA INDONESIA-KOREA  
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-  
CEPA) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI POLITIK  
INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2020-2023**

**Nama: Sitty Maisyaro Kalauw  
NIM : 146420121006**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 05 Juli 2025

Dekan FHSIPOL



**Tim Penguji Skripsi**

**1. Nurinaya, M.H.I.**  
NIDN. 1417129501

(.....)

**2. Etik Siswatiningrum, S.IP.,M.H.I**  
NIDN. 1409018401

(.....)

**3. Try Danuwijaya, M.H.I**  
NIDN. 1407129201

(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitty Maisyaro Kalauw  
NIM : 146420121006  
Judul Penelitian : Analisis Dampak Kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* Terhadap Peningkatan Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020-2023

Menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan data penulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dengan menacantumkan sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun hukum atas perbuatan tersebut.

Sorong, 05 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Sitty Maisyaro Kalauw

NIM. 146420121006

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) terhadap dinamika ekonomi politik internasional Indonesia pada kurun waktu 2020 hingga 2023. IK-CEPA merupakan instrumen bilateral strategis yang merefleksikan intensifikasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam merespons perkembangan konstelasi global, terutama di kawasan Asia Pasifik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teoritik pada Ekonomi Politik Internasional menurut Robert Gilpin dan konsep kepentingan nasional dari Hans J. Morgenthau. Analisis dilakukan berdasarkan sumber data sekunder yang mencakup dokumen perjanjian resmi, statistik perdagangan dan investasi, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Temuan menunjukkan bahwa perjanjian ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pasar, pertumbuhan investasi asing langsung (FDI), dan penguatan posisi diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global. Namun demikian, tantangan berupa ketimpangan struktural dan kecenderungan ketergantungan ekonomi terhadap mitra strategis tetap menjadi perhatian. Keberhasilan pelaksanaan IK-CEPA sangat ditentukan oleh sejauh mana Indonesia mampu mengelola peluang tersebut secara optimal, memperkuat kapasitas produksi domestik, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dalam tatanan perdagangan bebas yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** IK-CEPA, Ekonomi Politik Internasioanl, Kepentingan Nasional, Korea Selatan, Indonesia

### ***Abstract***

*This study aims to analisys the impact of the implementation of the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) on Indonesia's international political economy dynamics from 2020 to 2023. IK-CEPA is a strategic bilateral instrument that reflects the intensification of economic cooperation between Indonesia and South Korea in response to global developments, especially in the Asia-Pacific region. This study employs a descriptive qualitative approach grounded in Robert Gilpin's theory of international political economy and Hans J. Morgenthau's concept of national interest. The analysis is based on secondary data sources, including official agreement documents, trade and investment statistics, and publications from government agencies and international organizations. The findings indicate that this agreement has contributed to increased market access, growth in foreign direct investment (FDI), and the strengthening of Indonesia's economic diplomacy position at the global level. However, challenges such as structural imbalances and the tendency toward economic dependence on strategic partners remain a concern. The success of the IK-CEPA implementation is highly dependent on Indonesia's ability to optimize these opportunities, strengthen domestic production capacity, and ensure the implementation of policies that prioritize national interests within a fair and sustainable free trade framework.*

**Keywords:** IK-CEPA, International Political Economy, National Interest, South Korea, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Analisis Dampak Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023.*” Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Terselesaikannya karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral, serta menjadi sumber motivasi yang tidak pernah padam dalam setiap langkah hidup penulis.

Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Ibu Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan koreksi yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, kepada rekan-rekan seperjuangan dan sahabat terdekat yang turut memberikan semangat, dukungan emosional, serta menjadi mitra diskusi yang sangat berharga selama masa penelitian berlangsung.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu hubungan internasional, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hubungan Indonesia dengan mitra strategisnya, khususnya dalam kerangka kerja sama ekonomi internasional seperti IK-CEPA.

## **MOTTO**

*“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah  
keadaan diri mereka sendiri.”*

(Q.S. Ar Ra'd: 11)

*“It's fine to fake it until you make it, until you do, until it's true”*

*Taylor Swift -Snow On The Be*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan dan anugerah-Nya yang tiada terkira, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada usawatun khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang bersamanya kemuliaan dan keagungan Islam. Skripsi dengan dengan judul “Analisis Dampak Kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020-2023 “disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hubungan Internasional di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’la, Yang telah memberikan ridho dan kenikmatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Kepada kedua Orang Tua Papa Ismail Kalauw dan Mama Saida Kapitan yang senantiasa memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan juga dukungan moral kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terimakasih karena sudah menemani berproses dan selalu membuatku bangkit agar menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik terus kedepannya. semoga papa dan mama sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
3. Kepada keempat kakak, kedua ipar dan adik penulis, kak Muhammad Haris Lumahika, kak Jaddun A.K Lumahika S.T, kak Risma Kapitan, Idris Akbar Elly, Yusrina, Nurfitriani Wattiheluw dan adik Zulfikri Kalauw, yang telah memberikan nasehat, menguatkan penulis, kasih sayang, serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi ini.
4. Kepada keponakan-keponakan tercinta abang Arzyain Azka Lumahika, batin Arzaynal Raffa Lumahika, ade Azzahra Navya Lumahika dan ade Afif

Abdillah Husein Lumahika, terima kasih atas kelucuan kalian yang telah membuat penulis senang, sehingga semangat untuk mengerjakan skripsi sampai selesai.

5. Muhammad Rifqi, Yolanda Putri Aulia dan Hamya Prasetio, terimakasih karena sudah menjadi Abang sekaligus kakak bagi penulis. Terimakasih telah kebersamai penulis, memberikan motivasi, doa, selalu mendengarkan keluh kesah, kasih sayang, dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan semoga di kemudian hari kita bisa bertemu.
6. Dosen pembimbing I skripsi, Ibu Nurinaya, M.H.I. terimakasih telah memberi arahan, motivasi, serta mengarahkan penulis selama pengerjaan skripsi.
7. Dosen Pembimbing II skripsi sekaligus Ka. Prodi, Ibu Etik Siswati Ningrum, M.H.I. terimakasih telah membantu penuli dalam memperbaiki sistematika penulisan dalam skripsi ini, dan selalu memberikan motivasi pada penulis selama perkuliahan
8. Bapak Try Danuwijaya, M.H.I. selaku penguji yang memberikan saran, serta perbaikan dalam menulis skripsi.
9. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Politik UNIMUDA sekaligus pembimbing akademik terimakasih telah memberikan motivasi akademik selama penulis berkuliah.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis selama perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir ini.
11. Aisyah Hafidah sahabat yang kebersamai penulis dari SMA hingga sekarang, terimakasih karena sudah memberikan semangat, motivasi, tempat berkeluh kesah penulis selama pengerjaan skripsi ini.
12. Syafira Maharani Suara sahabat penulis dari SMA hingga sekarang sekaligus teman bimbingan, terimakasih telah memberikan penulis semangat, motivasi, tempat berkeluh kesah, yang terkadang mengantarkan penulis ke kampus yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

13. Fransiskus Xaverius Stainslaus Runaki, teman seangkatan penulis sekaligus ketua angkatan prodi hubungan Internasional 2021 yang selalu memberikan energi positif kepada penulis serta dukungan dalam pengerjaan skripsi.
14. Laili Mufidatul Almas, terimakasih untuk dukungan dan pesan moral selama ini kepada penulis.
15. Ayu Dwinta Sari Saifudin, Kristian Kornelius, Andre Kambu, dan Wiwik Pratiwi, terimakasih telah memberikan semangat dan mengisi kekosongan penulis sembari mengerjakan skripsi.
16. Seluruh teman seangkatan penulis (Desi Natalia, Ari Seknun, Alifano, Diana Warmasen, Jenny Laurens, Dita Nurul, Gita) terimakasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya selama masa perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir ini.
17. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terimakasih untuk patah hati dan kekecewaan yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini, Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar, dan menerima arti kehidupan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup, terimakasih telah menjadi bagian menyedihkan sekaligus menyakitkan, pada dasarnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
18. Kepada staf FHSIPOL, terima kasih telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas studi.
19. Terima Kasih kepada The 1975, NIKI, BTS, Taylor Swift yang setiap lagu yang didengarkan penulis saat pengerjaan skripsi.
20. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Sitty Maisyaro Kalauw. terimakasih Mai sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang harus dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru, walaupun dalam perjalanannya sering mengeluh, ingin menyerah, dan putus asa atas beberapa usaha yang tidak sebanding dengan hasilnya, namun terimakasih telah menjadi manusia kuat yang selalu bisa mengandalkan diri sendiri. Kamu hebat sudah sampai di titik ini, baik senang, sedih, berhasil maupun gagal. Berbahagialah dimanapun kamu berada Mai. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri

## DAFTAR ISI

BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Berpikir .....	8
1.4.1 Teori Ekonomi Politik Internasional (Robert Gilpin) .....	8
1.4.2 Kepentingan Nasional .....	13
1.5 Penelitian Terdahulu.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1 Tipe penelitian .....	23
1.6.2 Unit Analisa.....	24
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.6.4 Teknik Analisis Data .....	24
1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	25
1.7 Argumen Dasar.....	25
1.8 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
KEKUATAN IK-CEPA DI WILAYAH ASIA PASIFIK.....	27
2.1 Awal Mula Terbentuknya IK-CEPA .....	27
2.2. Tujuan Pembentukan.....	33
2.3 Perkembangan Sejak Awal Hingga Saat ini dan Komponen Utama Perjanjian meliputi tarif, Perdagangan Barang dan Investasi.....	34
BAB III .....	38
KERJASAMA EKONOMI <i>INDONESIA-KOREA SELATAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)</i> .....	38

3.1 KERJASAMA SEBELUM IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN .....	38
3.2 KERJASAMA SETELAH IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN .....	41
3.2.1 Penghapusan Tarif.....	41
3.2.2 Investasi .....	42
3.3.3 Kerjasama Ekonomi .....	43
3.3 PERBANDINGAN KESEPAKATAN SEBELUM DAN SESUDAH IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN .....	45
3.3.1 TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI IK-CEPA .....	46
3.3.2 PELUANG IMPLEMENTASI IK-CEPA .....	48
BAB IV .....	50
DAMPAK IK-CEPA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA-KOREA SELATAN.....	50
4.1 Dampak IK-CEPA terhadap Perekonomian Korea Selatan dan Indonesia.....	50
4.1.1 Dampak Ekonomi.....	51
4.1.2 Dampak Politik.....	59
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	lxxix

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	56
----------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	36
Gambar 4.1.....	60
Gambar 4.2.....	71
Gambar 4.3.....	74
Gambar 4.4.....	76

## DAFTAR ISTILAH

- AKFTA* : ASEAN-Korea Free Trade Agreement, Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Korea Selatan yang mencakup penghapusan tarif dan integrasi ekonomi kawasan.
- ASEAN* : Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara-negara kawasan Asia Tenggara.
- Asymmetric Interdependence* : Ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang antara dua negara, dimana salah satu pihak lebih dominan dari yang lain.
- CEPA* : Comprehensive Economic Partnership Agreement, perjanjian ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi strategis.
- EPI* : Ekonomi Politik Internasional, studi interdisipliner yang menganalisis keterkaitan antar kekuasaan politik dan sistem ekonomi global.
- FDI* : Foreign Direct Investment, Investasi langsung dari pihak asing ke negara tujuan, Misalnya dalam bentuk pendirian pabrik, perusahaan atau akuisisi saham.
- Free Trade Agreement* : Perjanjian antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota.
- IK-CEPA* : Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam sektor perdagangan, investasi, dan ekonomi.
- Investor-State Dispute Settlement* : Mekanisme penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah tanpa melalui pengadilan nasional.

- Joint Study Group* : Kelompok studi awal yang dibentuk Indonesia dan Korea Selatan untuk mengkaji kelayakan kerjasama ekonomi melalui IK-CEPA.
- Kepentingan Nasional : Tujuan utama suatu negara yang mencakup kedaulatan, keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
- Ketergantungan Struktural : Ketimpangan ekonomi sistematis antara negara berkembang dan negara industri yang memperkuat posisi dominan negara maju.
- Liberalisasi : Proses pembukaan pasar domestik terhadap perdagangan dan investasi asing melalui penghapusan hambatan.
- Multilateralisme : Bentuk kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara secara bersama-sama dalam kerangka organisasi internasional.
- Making 4.0* : Revolusi industri keempat yang menggabungkan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT)
- New Southern Policy* : Kebijakan luar negeri Korea Selatan yang bertujuan mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
- Produk Domestik Bruto : Ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu.
- Race To the Bottom* : Fenomena ketika negara-negara bersaing menarik investor asing dengan menawarkan insentif berlebihan, seringkali dengan mengorbankan hak pekerja atau lingkungan.
- Sanitary and Phytosanitary* : Standar dan aturan terkait kesehatan hewan, tumbuhan, dan manusia yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional.
- Special Strategic Partnership* : Bentuk kerjasama bilateral tingkat tinggi yang mencakup sektor strategis seperti ekonomi, pertahanan, dan teknologi.
- Tarif : Pajak atau bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan lintas negara.

- Technical Barriers to Trade* : Hambatan perdagangan non-tarif berupa perbedaan standar teknis, prosedur sertifikat, dan peraturan mutu.
- Trade Facilitation* : Kebijakan dan prosedur untuk menyederhanakan dan mempercepat arus barang lintas negara secara efisien.
- UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, unit bisnis dengan skala kecil yang berperan penting dalam ekonomi domestik

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Potensi ekonomi adalah konsep yang mengacu pada kemampuan suatu negara atau daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi, menurut Arsyad Lubis (2003), adalah suatu kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakatnya. Kapasitas untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, menurut Prof.Dr.Emil Salim, potensi ekonomi mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk modal, sumber daya alam dan manusia. Dalam hal ini potensi ekonomi tidak hanya terbatas pada sumberdaya yang ada, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan secara efektif sumber daya tersebut<sup>1</sup>.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan mendapat perhatian di dunia Internasional. Ekonomi Indonesia termasuk terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian.<sup>2</sup>

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang begitu erat membuat kedua negara tersebut menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973.

---

<sup>1</sup> (Dr. Syamsul Hadi, S.E., M.M dkk., “*STRATEGI MENYUSUN PETA POTENSI EKONOMI*”, editor Magister Alfatah Kalijaga, S.T., M.T., C.G.L. (EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021) Hal 1)

<sup>2</sup>(ekbangsetda, *EKONOMI INDONESIA*, <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ekonomi-indonesia-29>, Diakses pada 12 Desember 2024,)

Hubungan tersebut didasari pada strategi kemitraan yang mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi, budaya, teknologi, dan perlindungan. Sebagai dua negara yang memiliki kawasan asia dengan posisi strategi hubungan Korea selatan dan Indonesia mencerminkan semangat kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Pada awalnya, sulit untuk menggambarkan keadaan hubungan antara kedua negara sebagai hubungan yang memuaskan. Situasi internasional saat ini masih sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin, mempengaruhi politik masing-masing negara. Hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi tegang karena politik politik Korea Selatan cenderung pro-Barat sedangkan politik Indonesia cenderung anti-Barat.

Hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi baik setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1990-an, kedua negara berusaha memperbaiki hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Sektor budaya, ekonomi, dan politik, pada masa pemerintahan Soeharto (1967-1998) hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan mulai memepererat hubungan budaya mereka melalui pertukaran pendidikan dan budaya pada program pertukaran pelajar dan beasiswa membantu siswa belajar lebih banyak tentang budaya kedua negara. Selain itu, untuk memperkenalkan dan mempromosikan warisan budaya masing-masing, berbagai festival dan pertunjukan seni diadakan secara bergantian di kedua negara, Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi salah satu investor utama di Indonesia, dengan investasi yang mencakup sektor manufaktur, elektronik, dan otomotif Perusahaan-perusahaan Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai mulai beroperasi di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, perdagangan bilateral meningkat, dengan Korea Selatan menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. serta sektor-sektor lainnya yang menjadi fokus utama dari upaya tersebut. Peningkatan komunikasi mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan kerjasama yang terjalin. Beralih dari fokus awal pada perdagangan dan kerjasama ekonomi menjadi kemitraan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai bidang. Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi terbuka telah berupaya memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai

bentuk kerjasama internasional, termasuk perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Korea Selatan<sup>3</sup>.

Pemerintah Indonesia menjalin berbagai kolaborasi salah satunya yakni perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh antara Indonesia dan Korea Selatan yang disebut Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), yang merupakan perjanjian bilateral dalam perdagangan bebas (FTA) yang mencakup berbagai sektor perdagangan barang, jasa, investasi, kolaborasi ekonomi dan hukum antar kedua negara. Pemerintah Indonesia telah menyetujui perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan September 2022 dan mulai diimplementasikan secara resmi sejak 1 Januari 2023<sup>4</sup>.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan secara resmi di mulai. Implementasi sekaligus memperingati 50 tahun hubungan kemitraan kedua negara yang menunjukkan hubungan “*Special Strategic Partnership*” yang telah di bangun kedua negara sejak 2017. IK-CEPA juga membantu kedua negara memperkuat hubungan ekonomi, khususnya perdagangan dan Investasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap pelaksanaan IK-CEPA akan membuka “Jalan Tol” perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan yang semakin terbuka luas.

*“Dengan Implementasi IK-CEPA pada 1 Januari 2021, para pelaku usaha dapat memanfaatkan cakupan IK-CEPA yang komprehensif. misalnya, penghapusan tarif bea masuk perdagangan barang, peningkatan kesempatan perdagangan jasa, peningkatan peluang investasi, serta peningkatan kerja sama ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia,”* ujar MENDAG, Zulkifli Hasan, di laman resmi KEMENDAGRI<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>(Ragimun Abdullah, 2017, *Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA*, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 8 No. 6, 2017, 171-182)

<sup>4</sup>(KEMENKEU 2023, “*IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea*” <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html>, Diakses 25 Desember 2024, 15:20)

<sup>5</sup>(KEMENDAGRI 2023, “*IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Mendag Zulkifli Hasan: “Jalan Tol” Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas*”, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-mendag-zulkifli-hasan-jalan-tol-perdagangan-indonesia-korea-mulai-terbuka-luas>, Diakses 24 Desember 2024, 16:30)

IK-CEPA (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*) adalah contoh utama dari upaya strategi yang dilakukan oleh kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara<sup>6</sup>. Perjanjian ini telah memfasilitasi pemenuhan komoditas yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus akses kepada Korea Selatan ke yang lebih besar. Sebelum diresmikan oleh Presiden dari kedua negara perundingan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) diawali dengan pembentukan *Joint Study Group (JSG)* untuk menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melewati 3 kali pertemuan di tahun 2011 di Jakarta dan Seoul dengan menghasilkan *Report of JSG*.

Presiden Republik Korea Selatan yang disampaikan pada saat kunjungan kehormatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai *Special Envoy* Presiden Republik Indonesia ke Seoul pada tanggal 14-17 Februari 2011. Permintaan ini dibuat sebagai bagian perundingan IK-CEPA yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Myung Bak di tengah pertemuan *Nuclear Security Summit* pada 28 Maret 2012, dari pertemuan tersebut kedua negara akhirnya setuju untuk memulai perundingan IK-CEPA pada tahun 2012.<sup>7</sup> Setelah berlangsung selama 7 putaran, perundingan perjanjian dagang bilateral antara Indonesia dan Republik Korea tersebut dihentikan sementara disebabkan oleh pergantian pemerintah pada tahun 2014. Pada 19 Februari 2019, Indonesia dan Republik Korea melanjutkan kembali perundingan IK-CEPA. Kedua belah pihak berhasil menandatangani kembali perjanjian tersebut pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan dan resmi diimplementasikan pada 1 Januari 2023<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> (Ragimun Abdullah, 2017, *Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA*, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 8 No. 6, 2017, 171-182)

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA*)", Diakses 20 April 2025, 18:26)

[https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pengesahan\\_ikcepa.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pengesahan_ikcepa.pdf)

<sup>8</sup> IK-CEPA, "*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*" (<https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa>, Diakses 25 Desember 2024, 20:35)

Kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia didasarkan pada prinsip saling melengkapi yang dimiliki oleh kedua negara. Indonesia memiliki keunggulan dalam bentuk sumber daya alam yang melimpah, potensi pasar yang besar, serta ketersediaan tenaga kerja. Di sisi lain, Korea Selatan menawarkan tingkat penguasaan modal, teknologi, dan keterampilan manajerial yang tinggi. Sinergi antara kekuatan sumber daya Indonesia dan kapabilitas teknologi Korea Selatan menciptakan peluang strategis bagi peningkatan kerjasama bilateral. Hal ini tercermin dari meningkatnya aktivitas perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi, yang turut disertai dengan penguatan hubungan politik serta interaksi sosial budaya antara kedua negara.

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan menjadikan adanya kepentingan politik melalui perjanjian IK-CEPA memiliki peran strategis untuk memperkuat peluang kerjasama yang sebelumnya belum pernah terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan. Seperti fasilitasi perdagangan, liberalisasi investasi dan harmonisasi aturan Kepabeanan. IK-CEPA juga meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan penanaman modal dengan melindungi investor dari kedua negara dan memberikan jaminan hukum bagi para investor. Perdagangan bebas meningkatkan ekonomi dan mencegah perang dengan meningkatkan ketergantungan negara. Dalam cakupan IK-CEPA membahas tarif, pengurangan hambatan nontarif, dan penyelesaian masalah teknis seperti, kepabeanan, *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). sebaliknya, IK-CEPA mendorong kerjasama di bidang logistik, ketenagakerjaan, lingkungan, ekonomi kreatif, dan pembangunan kapasitas. Dari kerjasama tersebut dapat meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Oleh karena itu, IK-CEPA membantu Indonesia dan Korea Selatan meningkatkan hubungan diplomatik dan sinergi strategis di berbagai tingkatan, baik di tingkat regional maupun Internasional.

Dari analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) telah meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Dengan adanya kerjasama ini sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik agar membantu

kestabilan perdagangan ekonomi politik internasional bagi kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Dampak Kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Indonesia Tahun 2020- 2023?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menganalisis dampak implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) terhadap ekonomi politik internasional antara Korea Selatan dan Indonesia
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam implementasi IK-CEPA serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan politik Internasional.
3. Mengidentifikasi kontribusi IK-CEPA melalui perjanjian internasional dalam meningkatkan ekonomi politik internasional indonesia dan Korea Selatan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan Ilmu Hubungan Internasional  
Studi ini dapat meningkatkan teori hubungan internasional, terutama tentang bagaimana perjanjian bilateral memperkuat hubungan ekonomi dan politik antar negara.
- b. Peningkatan pemahaman Konseptual  
Memberikan pemahaman mendalam tentang kerjasama ekonomi politik internasional melalui IK-CEPA.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Panduan Bagi pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menerangi dan meningkatkan pelaksanaan IK-CEPA dengan cara yang akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

b. Strategi Peningkatan Kerjasama Ekonomi

Memberikan saran tentang cara memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi bilateral dengan Korea Selatan seperti, diversifikasi ekspor dan meningkatkan daya saing dalam bidang tertentu.

c. Rekomendasi bagi Sektor Swasta

Menyediakan informasi bagi pelaku bisnis di Indonesia tentang peluang yang ditawarkan oleh IK-CEPA, termasuk peluang ekspor, investasi, dan kolaborasi industri.

### **3. Manfaat Akademis**

a. Studi Kasus yang Relevan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, akademisi, dan penelitian di bidang Hubungan Internasional dan ekonomi global, terutama yang berkaitan dengan pengaruh perjanjian ekonomi bilateral

b. Pengayaan Literatur

Menambah penelitian tentang peran perjanjian bilateral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang relevan untuk penelitian Hubungan Ekonomi dan Internasional

### **4. Manfaat Sosial-Ekonomi**

a. Peningkatan Kesadaran Publik

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap kehidupan sehari-hari terutama dalam konteks peluang pekerjaan dan akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

b. Pengembangan Kebijakan Inklusi

Membantu memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat di Indonesia mendapatkan manfaat dari IK-CEPA melalui pembuatan kebijakan yang lebih inklusif.

## 1.4 Kerangka Berpikir

### 1.4.1 Teori Ekonomi Politik Internasional (Robert Gilpin)

Ekonomi Politik Internasional merupakan sebuah studi yang mematahkan anggapan bahwa disiplin ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang tidak saling berkaitan, bahkan banyak yang beranggapan bahwa Ekonomi harus dijalankan secara murni atau tanpa campur tangan negara atau aspek politik. Namun, pada kenyataannya ketidakhadiran unsur politik dalam aktivitas ekonomi akan menyebabkan kekacauan.

Teori Ekonomi Politik Internasional yang diusulkan oleh Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul "*Global Understanding Political the International Economic Order*" merupakan analisis yang menggabungkan aspek politik dan ekonomi untuk memahami interaksi kekuasaan, kepentingan negara, serta, pasar global dalam konteks sistem internasional. Secara rinci, studi ekonomi politik internasional menitikberatkan pada pasar, lembaga, dan rezim yang berpengaruh pada keadaan ekonomi dan kemandirian politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Gilpin memandang ekonomi internasional sebagai tempat dimana negara bersaing dan berkolaborasi untuk mencapai kepentingan nasional. Gilpin mengemukakan bahwa ekonomi politik internasional berfokus pada interaksi antara 3 pendekatan utama: pendekatan Liberalisme, Merkantilisme, dan Marxisme, yang masing-masing mencerminkan sudut pandang yang beragam mengenai hubungan antara negara, kekuasaan, dan pasar<sup>9</sup>.

Robert Gilpin dalam kerangka *International Political Economy* (EPI) menegaskan bahwa ekonomi dan politik merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan internasional. Dalam pandangannya, negara tidak hanya berperan sebagai aktor pasif dalam sistem pasar global, tetapi secara aktif menggunakan kebijakan ekonomi sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingan nasional, terutama terkait dengan kekuasaan, keamanan, dan stabilitas. Sistem ekonomi internasional, bagi Gilpin, adalah arena pertarungan kepentingan di mana negara-negara bersaing, berkoalisi, dan membentuk tatanan global melalui instrumen seperti perdagangan, investasi, dan diplomasi ekonomi.

---

<sup>9</sup> Robert Gilpin With The Assistance Of Jean M. Gilpin, "*Global Political Economic Understanding Political the International Economic Order*" (New Jersey: Priceton University Press, 2001), hlm15-19.

Konsep ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis implementasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. Perjanjian tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong efisiensi ekonomi melalui liberalisasi tarif, peningkatan ekspor-impor, dan insentif investasi, melainkan juga sebagai strategi Indonesia untuk memperkuat posisi geostrategisnya di kawasan Indo-Pasifik. IK-CEPA menjadi instrumen negara untuk meraih *leverage* politik dalam kerangka multilateralisme dan regionalisme Asia Timur.

Dalam praktiknya, Indonesia menggunakan IK-CEPA untuk mendorong transformasi industri nasional melalui kerja sama teknologi, khususnya dalam sektor *Industry 4.0*, serta mendorong ekspor produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memiliki nilai tambah tinggi. Di sisi lain, Korea Selatan memanfaatkan kerja sama ini untuk mengamankan pasokan sumber daya strategis seperti batu bara, nikel, dan feronikel, yang dibutuhkan untuk mendukung agenda transisi energinya. Ini mencerminkan apa yang disebut Gilpin sebagai *asymmetric interdependence*—ketergantungan dua negara yang tidak setara, namun saling menguntungkan secara struktural.

Pembentukan rezim bilateral seperti *Joint Committee, Working Group*, serta forum konsultasi ekonomi di bawah kerangka IK-CEPA mencerminkan pentingnya institusi internasional dalam menciptakan keteraturan, stabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hubungan ekonomi antarnegara. Hal ini sejalan dengan pandangan Gilpin bahwa institusi global tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknokratis, melainkan juga merupakan hasil dan cerminan dari distribusi kekuasaan dalam sistem internasional. Dengan demikian, IK-CEPA tidak sekadar menjadi platform ekonomi, melainkan menjadi bagian dari strategi ekonomi-politik Indonesia dalam memperkuat posisi tawarnya di tengah dinamika global seperti rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, krisis rantai pasok, dan kompetisi teknologi. Kerja sama ini menunjukkan bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia mampu menggunakan perjanjian ekonomi untuk memajukan kepentingan nasional, mengurangi ketimpangan struktural, dan mengukuhkan kedaulatan ekonomi dalam tatanan dunia yang multipolar.

Dalam teorinya tentang ekonomi politik internasional, melalui pendekatan marxisme, Menurut Robert Gilpin, pendekatan Marxis dalam ekonomi politik

internasional menyoroti peran sentral konflik kelas serta ketimpangan struktural sebagai faktor utama dalam dinamika hubungan ekonomi antarnegara. Marxisme melihat hubungan antar negara dan ekonomi sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang lebih besar, dimana kebijakan ekonomi dan politik dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kelas dominan. Hubungan antara politik dan ekonomi global dengan fokus pada dinamika interaksi antar negara dalam sistem ekonomi internasional. Teori yang dikemukakan oleh Gilpin relevan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis mengenai “**Analisis Dampak Kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2023***” karena menjelaskan bagaimana kepentingan nasional, struktur kekuasaan global dan integrasi ekonomi yang mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan teori dengan judul yang diambil oleh penulis adalah:

**Pendekatan Marxisme:** Pendekatan Marxis cenderung memberikan kritik terhadap sistem kapitalisme global dengan menyoroti ketimpangan struktural yang timbul akibat distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antarnegara. Dalam konteks kerja sama ekonomi bilateral, seperti yang tercermin dalam perjanjian perdagangan bebas *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih dominan cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan negara mitra yang berada dalam tahap perkembangan. Meskipun secara normatif perjanjian ini dirancang untuk memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik, implementasinya justru dapat memperkuat bentuk ketimpangan baru yang dikenal dalam literatur sebagai ketergantungan struktural (*structural dependency*), di mana negara berkembang tetap berada dalam posisi subordinat dalam tatanan ekonomi global.

Sebagai contoh, masuknya investasi skala besar dari Korea Selatan ke sektor manufaktur dan infrastruktur di Indonesia memang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Namun, jenis pekerjaan yang tersedia umumnya terbatas pada tingkat operasional atau buruh kasar, bukan pada posisi strategis yang memungkinkan partisipasi dalam pengambilan keputusan atau penguasaan teknologi. Kondisi ini mencerminkan dominasi penuh investor asing atas modal dan

teknologi, di mana tenaga kerja lokal hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam proses produksi. Ketiadaan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal menunjukkan rendahnya dampak positif jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Fenomena ini sejalan dengan pendekatan Marxis yang menyoroti praktik eksploitasi tenaga kerja serta konsentrasi akumulasi kapital di tangan elit ekonomi dan negara-negara industri maju.

Lebih lanjut, keberadaan perusahaan multinasional asal Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia kerap kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem regulasi nasional serta daya tawar pemerintah yang terbatas. Hal ini memungkinkan mereka memperoleh berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak atau keringanan tarif impor, yang menguntungkan pihak investor secara sepihak. Fenomena ini mencerminkan dinamika yang dikritik dalam pendekatan Marxis, khususnya terhadap neoliberalisme dan liberalisasi ekonomi, di mana negara-negara berkembang terjebak dalam praktik *race to the bottom*. Dalam upaya menarik investasi asing, negara-negara tersebut cenderung saling bersaing menawarkan kebijakan yang menguntungkan korporasi, namun berisiko mengorbankan kepentingan nasional, seperti perlindungan pekerja lokal, kedaulatan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Dalam perspektif Marxisme, Gilpin menekankan bahwa sistem ekonomi global bersifat hierarki dan didominasi oleh korporasi multinasional dan negara maju. Korea Selatan memiliki posisi yang lebih kuat dalam IK-CEPA dibandingkan Indonesia, yang masih merupakan negara berkembang karena menjadi negara industri maju. Menurut Gilpin, dominasi negara yang lebih kuat cenderung diperkuat oleh hubungan ekonomi internasional. Di sisi lain, negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih lemah cenderung mengalami pendalaman ketergantungan terhadap aktor-aktor ekonomi yang lebih dominan. Dalam hal ini, perjanjian ekonomi seperti *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) berpotensi tidak hanya mereproduksi, tetapi juga memperkuat pola relasi asimetris antara negara berkembang dan negara maju. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam skema kerja sama tersebut dapat memperkuat ketergantungan terhadap sektor industri dan akses pasar modal milik Korea Selatan. Ketergantungan ini mencakup transfer teknologi yang terbatas, dominasi

perusahaan multinasional asing dalam sektor strategis, serta rendahnya kemandirian ekonomi nasional, yang secara keseluruhan dapat menghambat transformasi struktural jangka panjang dalam perekonomian domestik.

Selanjutnya, Gilpin menegaskan bahwa struktur ekonomi global tidak bersifat netral atau bebas nilai, melainkan dikonstruksi dan dikendalikan oleh kepentingan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan teknologi unggul. Negara seperti Korea Selatan, yang telah mengembangkan ekosistem industri berbasis teknologi tinggi dan memiliki akses luas ke jaringan pasar keuangan internasional, mampu menggunakan mekanisme liberalisasi perdagangan sebagai sarana untuk memperluas pengaruh geopolitik dan hegemoninya di kawasan. Sementara itu, Indonesia, yang masih mengandalkan sektor primer dan tenaga kerja berupah rendah, memiliki daya tawar yang terbatas dalam negosiasi dan implementasi perjanjian ekonomi semacam ini. Ketimpangan ini mencerminkan bentuk modern dari dominasi kapitalis, di mana negara berkembang secara sistematis diposisikan dalam peran subordinat dalam rantai nilai global.

Dalam analisis Gilpin, proses globalisasi dan perdagangan bebas tidak hanya membuka peluang integrasi pasar, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan dan reproduksi ketergantungan struktural jangka panjang. Oleh karena itu, dalam mengkaji implementasi IK-CEPA, penting untuk tidak hanya fokus pada indikator kuantitatif seperti volume perdagangan atau total investasi yang masuk, tetapi juga mempertimbangkan aspek distribusi keuntungan, penguasaan teknologi, serta dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Apakah perjanjian tersebut benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas domestik, atau justru memperkuat posisi dominan aktor luar dan memperlemah posisi strategis Indonesia dalam sistem ekonomi global, menjadi pertanyaan kunci dalam evaluasi kebijakan ekonomi luar negeri berbasis teori ekonomi politik internasional.

Oleh karena itu, pendekatan Marxis dalam teori Robert Gilpin memiliki relevansi yang tinggi dalam mengkaji dinamika hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan setelah diberlakukannya perjanjian IK-CEPA. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman terhadap dominasi struktural negara-negara maju dalam sistem ekonomi global, tetapi juga menawarkan

kerangka kritis untuk menilai aspek keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, dampak sosial yang ditimbulkan, serta keberlanjutan jangka panjang dari perjanjian perdagangan internasional. Dalam konteks penelitian ini, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana struktur kekuasaan ekonomi global memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional, serta dampaknya terhadap pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

#### 1.4.2 Kepentingan Nasional

Konsep **kepentingan nasional** merupakan fondasi utama dalam studi hubungan internasional yang berfungsi sebagai kerangka acuan dalam perumusan kebijakan domestik maupun luar negeri suatu negara. Dalam perspektif realisme klasik, Hans J. Morgenthau (1948) memandang kepentingan nasional tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan kedaulatan semata, melainkan mencakup seluruh upaya negara untuk mempertahankan eksistensinya melalui penguatan dimensi ekonomi, politik, dan stabilitas sosial. Morgenthau menekankan bahwa kepentingan nasional merupakan prinsip rasional dan objektif yang bersifat tetap, karena didasarkan pada kodrat manusia yang memiliki hasrat akan kekuasaan (*lust for power*). Dalam konteks ini, setiap kebijakan luar negeri harus diarahkan untuk mempertahankan kekuatan dan mengamankan posisi negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis dan kompetitif<sup>10</sup>.

Lebih lanjut, Morgenthau menjelaskan bahwa negara harus menggunakan kekuasaan secara strategis untuk mencapai kepentingannya, terutama dalam menghadapi tekanan globalisasi dan interdependensi ekonomi. Oleh karena itu, kerja sama ekonomi bilateral seperti **Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)** tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perjanjian dagang, melainkan harus dianalisis dalam kerangka ekonomi politik internasional yang mempertimbangkan aspek kekuasaan, kedaulatan, serta kepentingan nasional jangka panjang. IK-CEPA merupakan instrumen penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan posisi tawar Indonesia di kawasan Asia

---

<sup>10</sup> Morgenthau, H. J. (2023) The Primacy Of The National Interest. The American Scholar: The National Interest and Moral principles in Foreign Policy, 18(2),207-212.

Timur, serta memperluas akses pasar global melalui diplomasi ekonomi yang strategis.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, khususnya selama periode 2020–2023, kepentingan nasional menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan implementasi IK-CEPA. Hal ini sejalan dengan pandangan Morgenthau yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan luar negeri tidak hanya diukur dari peningkatan interaksi formal antarnegara, tetapi dari kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan utama negara: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap IK-CEPA perlu mempertimbangkan apakah kerja sama ini mampu memperkuat posisi Indonesia secara ekonomi dan politik di kancah internasional.

Morgenthau mengidentifikasi beberapa aspek penting yang membentuk kepentingan nasional, yakni:

1. **Pertumbuhan ekonomi** sebagai pilar utama kekuatan nasional,
2. **Kedaulatan ekonomi** sebagai kontrol negara atas sumber daya vital,
3. **Distribusi kekayaan yang adil** sebagai dasar stabilitas sosial dan politik, serta
4. **Keberlanjutan pembangunan** sebagai jaminan keberlangsungan kepentingan jangka panjang.

Aspek-aspek ini dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif terhadap dampak IK-CEPA bagi ekonomi politik internasional Indonesia.

Dari segi **pertumbuhan ekonomi**, IK-CEPA memberikan peluang strategis untuk mendorong peningkatan ekspor nasional, menarik investasi langsung asing (FDI), serta memperkuat sektor manufaktur dan infrastruktur melalui keterlibatan mitra dagang yang memiliki teknologi lebih maju. Namun, realisasi manfaat tersebut sangat tergantung pada kemampuan Indonesia dalam membangun struktur industri yang tangguh, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas daya saing produk lokal di pasar internasional. Tanpa upaya serius dalam restrukturisasi industri, Indonesia berisiko tetap terjebak sebagai penyedia bahan mentah dan tenaga kerja murah, dengan nilai tambah ekonomi yang rendah.

Dari perspektif **kedaulatan ekonomi**, perjanjian seperti IK-CEPA perlu dianalisis secara hati-hati, terutama dalam hal implikasinya terhadap kendali negara

atas sektor-sektor strategis. Liberalisasi pasar dan pembukaan sektor tertentu bagi investor asing dapat melemahkan peran negara dalam mengatur sumber daya penting, seperti energi, pangan, dan telekomunikasi. Untuk itu, perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta keberadaan kebijakan industri nasional yang adaptif, menjadi syarat mutlak guna menjaga kemandirian dan integritas ekonomi nasional.

Dalam aspek **distribusi kekayaan**, kerja sama ekonomi harus dilihat dari bagaimana manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar berpotensi menimbulkan disparitas sosial dan ekonomi jika hasil kerja sama hanya terakumulasi pada kelompok elit atau perusahaan besar. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi hasil ekonomi dan pembangunan kapasitas SDM lokal harus diintegrasikan dalam kerangka kerja implementasi IK-CEPA untuk menjamin manfaat yang inklusif.

Aspek terakhir, yaitu **keberlanjutan**, menjadi dimensi krusial dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui kerja sama internasional tidak mengorbankan lingkungan hidup, sumber daya alam, atau hak-hak pekerja. Pendekatan pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi kebijakan industri hijau, investasi berwawasan lingkungan, dan mekanisme transfer teknologi dari negara mitra agar pembangunan yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi memberi dampak jangka panjang.

Dengan demikian, konsep kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau menjadi landasan teoritis yang relevan dan aplikatif dalam menganalisis dampak kerja sama ekonomi bilateral seperti IK-CEPA. Perjanjian ini harus dipahami dalam konteks strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan memperkuat daya saing global, menjaga kedaulatan ekonomi, mendorong pemerataan kesejahteraan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi IK-CEPA, dengan demikian, tidak hanya bergantung pada isi kesepakatan secara formal, tetapi juga pada bagaimana Indonesia mengelola dan mengimplementasikannya secara strategis untuk mencapai tujuan nasional yang telah dirumuskan.

Berdasarkan analisis kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau, dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi Indonesia tahun 2020–2023

sangat bergantung pada bagaimana Indonesia mengelola dan memanfaatkan kesepakatan ini. Untuk memastikan bahwa IK-CEPA benar-benar melayani kepentingan nasional, pemerintah Indonesia harus meningkatkan daya saing industri dalam negeri, melindungi kedaulatan ekonomi, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada isi kesepakatan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana Indonesia mengimplementasikannya sesuai dengan prinsip kepentingan nasional.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	<p><i>“South Korea's Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia”</i></p> <p>Ulim Maidatul Cholif Arie Kusuma Paksi</p>	<p>Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.</p> <p>Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori kerjasama ekonomi</p>	<p>Menganalisis alasan di balik keputusan Reaktivasi Negosiasi di tahun 2019 terhadap Indonesia yang didasarkan pada kepentingan nasional untuk mencapai surplus perdagangan dan FDI di indonesia. kerjasama ekonomi sebagai bentuk untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait alasan di balik kebijakan luar negeri Korea Selatan untuk mengaktifkan kembali perundingan <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK-CEPA) setelah tertunda sejak tahun 2014 dan kembali diaktifkan pada tahun 2019, Sedangkan penulis membahas analisis dampak IK-</p>

			nasional	CEPA terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia tahun 2020-2023
2.	<p>“Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan dalam <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (IK-CEPA)”</p> <p>Rina Ariyanthi Dewi</p>	<p>Metode yang digunakan oleh penulis tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif untuk mengeksplorasi diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea selatan melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia - Korea (IK-CEPA). Dan</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa IK-CEPA dimaksud untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan Korea Selatan.</p>	<p>Pada penelitian jurnal ini membahas bagaimana proses diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA, serta kepentingan nasional yang ingin di capai dari kerjasama ini dengan menekankan peningkatan perdagangan dan investasi bilateral, sedangkan penulis membahas mengenai analisis dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia tahun 2020-2023</p>

		menggunakan Teori Diplomasi Ekonomi oleh Okano-Hejima		
3.	“Implementasi Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)” Andhira Prameswari Maharani	Penulis menggunakan 3 metode penelitian yaitu: Penelitian Normatif yang berarti fokus pada analisis hukum berdasarkan norma-norma mencakup pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami implikasi hukum dari IK-CEPA, Metode	Menganalisis tujuan dan pentingnya IK-CEPA dan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. memanfaatkan keunggulan komparatif dan meningkatkan volume perdagangan, akses pasar, dan investasi. Dasar hukum yang mendasari IK-CEPA serta pentingnya ratifikasi	Pembahasan dalam jurnal tersebut hanya membahas pengaruh implementasi kerjasama IK-CEPA terhadap perekonomian Indonesia dengan fokus pengambilan data sektor Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, serta ekspor-impor antara Indonesia dan Korea Selatan, sedangkan penulis membahas mengenai analisis dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia tahun 2020-2023

		<p>kualitatif dengan pendekatan literatur riset dan hukum normatif, di mana data deskriptif dikumpulkan dari berbagai sumber, serta Pendekatan perundang-undangan untuk menerjemahkan materi muatan dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan melibatkan analisis komprehensif mengenai isi dan tujuan dari perjanjian tersebut</p>	<p>perjanjian internasional ini menjadi fokus utama. Membahas strategi dan jangka panjang terhadap perekonomian.</p>	
--	--	--	--	--

4.	<p><i>The Impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for Indonesia</i></p> <p>Nabila Salsa Bilal Hasna Wijayati</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan kedua penulis yaitu: Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penulis menjelaskan, menganalisis, dan melakukan penelitian secara subjektif. Dan menggunakan 2 teori yaitu: Teori Kerjasama Internasional, Teori ini menjelaskan bahwa hubungan internasional</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan bagaimana IK-CEPA memberi perusahaan Indonesia peluang untuk menarik investasi asing dan menjadi bagian dari industri pendukung perusahaan Korea Selatan. Selain itu, pihak Korea Selatan memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja Indonesia.</p>	<p>Pada penulisan jurnal membahas secara khusus dampak kerja sama ekonomi Indonesia–Korea Selatan melalui perjanjian IK-CEPA terhadap Indonesia, terutama setelah penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun 2020, sedangkan penulis membahas bagaimana analisis dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia tahun 2020-2023</p>
----	---	--	---	--

		yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain tidak terlepas dari kerjasama internasional dan Teori Diplomasi Ekonomi, Teori ini memberikan pandangan bahwa tindakan diplomasi atau kerjasama antara negara dapat memberikan dampak positif terhadap perdagangan bilateral dan investasi antara kedua		
--	--	---	--	--

		negara.		
5.	<p>“Analisis Implementasi Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam Kerangka <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)</i>”</p> <p>Suci Lestari (E061181028)</p>	<p>Dalam penulisan Skripsi tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori dan konsep yaitu: Metode kualitatif Pengumpulan data melalui data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta metode deduktif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai masalah yang</p>	<p>Pentingnya kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, serta bagaimana IK-CEPA berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melalui IK-CEPA. Serta, strategi yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengimplementasikan IK-CEPA</p>	<p>Pada penulisan skripsi ini membahas mengenai peluang yang dapat Indonesia capai dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasi kerjasama IK-CEPA dengan menitikbertakan pada 3 pilar utama dalam perjanjian IK-CEPA yaitu: Akses pasar untuk perdagangan barang dan jasa, fasilitas perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan pengembangan kapasitas, sedangkan penulis membahas bagaimana analisis dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia tahun 2020-2023</p>

		diteliti, Teori Kerjasama Bilateral untuk menganalisis hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks ekonomi, serta Konsep Free Trade Agreement (FTA) dan Teori Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)		
--	--	--	--	--

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan menjelaskan dampak Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap peningkatan ekonomi politik Internasional Indonesia pada periode 2020-2023. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi

pola, tren, dan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam konteks hubungan internasional secara holistik. Fokus penelitian adalah pada dampak IK-CEPA terhadap volume perdagangan, investasi, kerja sama ekonomi bilateral dan politik.

### **1.6.2 Unit Analisa**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan ekonomi Indonesia, yang diukur melalui indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan ekspor-impor, dan investasi asing langsung (FDI) dari Korea Selatan. Sementara itu, variabel independennya adalah pelaksanaan IK-CEPA, yang mencakup kebijakan perdagangan bebas, penghapusan tarif, serta peningkatan akses pasar bagi barang dan jasa kedua negara. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta jurnal akademik.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui **Studi Literatur** Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan **Dokumen Resmi**: Dokumen perjanjian IK-CEPA dan laporan dari Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik, serta Bank Indonesia. **Laporan Organisasi Internasional**: Laporan dari WTO, UNCTAD, dan organisasi lain yang relevan. **Literatur Akademik**: Artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas IK-CEPA atau kerja sama ekonomi bilateral. **Data Statistik**: Data perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Data dianalisis melalui berbagai langkah. Dampak kerja sama terhadap perdagangan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja disoroti melalui rangkum dan pemisahan informasi mentah pada tahap pertama. Selanjutnya, untuk memudahkan interpretasi, data disajikan dalam tabel kualitatif. Misalnya, melakukan perbandingan antara data ekspor dan impor Indonesia ke Korea Selatan sebelum dan sesudah implementasi IK-CEPA. Pada langkah terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan bahwa temuan

itu valid. Triangulasi membuat hasil yang dihasilkan lebih akurat dan terpercaya dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu.

### **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **a) Batasan Materi**

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan penelitian hanya pada analisis dampak IK-CEPA terhadap peningkatan ekonomi Indonesia yang merujuk pada ekonomi politik internasional dan kepentingan nasional. Dengan Penelitian ini berfokus pada wilayah Indonesia sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari kerja sama ekonomi ini; namun, sebagai bagian dari analisis bilateral, penelitian juga mengkaji hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam hal perdagangan dan investasi.

#### **b) Batasan Waktu**

Penelitian dilakukan dari tahun 2020 hingga 2023, atau dari awal penerapan IK-CEPA hingga tiga tahun kemudian. Tujuan dari periode ini adalah untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi setelah perjanjian kerjasama tersebut diimplementasikan dengan di tandai volume peningkatan ekonomi perdagangan dan investasi.

### **1.7 Argumen Dasar**

Kerjasama ekonomi politik internasional yang terjalin melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) memberikan peluang strategis bagi Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat sektor perdagangan, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Potensi ekonomi politik internasional kedua negara menjadi fondasi yang kuat dalam memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Melalui IK-CEPA Indonesia dan Korea Selatan membangun iklim perdagangan Internasional dan komprehensif dalam kurun waktu pemerintahan presiden Jokowi Widodo (2020-2023) IK- CEPA .

### **1.8 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi alasan untuk penelitian tersebut, penulis mendeskripsikan rumusan masalah yang menjadi fenomena utama yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir yang berisi konsep kepentingan nasional dan teori

ekonomi politik, tinjauan pustaka, metode penelitian, argumen dasar dan rencana untuk memabakan penulisan.

## **BAB II KEKUATAN IK-CEPA DI WILAYAH ASIA PASIFIK**

Pada bab ini penulis penulis akan menjelaskan mengenai awal mula terbentuknya IK-CEPA, Sejarah IK-CEPA, Tujuan Pembentukan, Perkembangan sejak awal hingga saat ini dan Komponen Utama Perjanjian meliputi tarif, Perdagangan Barang dan Investasi dan dalam penelitian bab ini penulis juga membahas mengenai hubungan kerjasama antara Indonesia-Korea dalam untuk IK-CEPA.

## **BAB III KERJASAMA EKONOMI *INDONESIA-KOREA SELATAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (IK-CEPA)**

Pada bab ini penulis membahas mengenai Kerjasama IK-CEPA Sebelum Diimplementasikan, Kerjasama IK-CEPA Sesudah Diimplementasikan dengan beberapa sub-bab yang di bahas oleh penulis yaitu Penghapusan Tarif, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi. Adapun penulis membahas mengenai Perbandingan Kesepakatan Sebelum dan Sesudah IK-CEPA Diimplementasikan. Penulis juga membahas tentang Tantangan dan Peluang Dalam Mengimplementasikan IK-CEPA

## **BAB IV DAMPAK IK-CEPA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA-KOREA SELATAN**

Pada bab ini penulis akan mengeksplorasikan bagaimana berdampaknya IK-CEPA terhadap perekonomian Indonesia dan Korea Selatan dengan sub-bab yang diteliti oleh penulis mengenai Dampak Ekonomi dan Dampak Politik yang diberikan oleh IK-CEPA terhadap Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan pernyataan kesimpulan serta jawaban dari pokok permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. menjelaskan secara rinci mengenai kesimpulan dan saran besar penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya

## **BAB II**

### **KEKUATAN IK-CEPA DI WILAYAH ASIA PASIFIK**

#### **2.1 Awal Mula Terbentuknya IK-CEPA**

Hubungan Ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan ditandai oleh tingginya nilai perdagangan bilateral dan investasi. Korea selatan merupakan salah satu investor utama di Indonesia, Khususnya di sektor manufaktur, infrastruktur, teknologi, dan pertambangan. Sebaliknya, Indonesia menjadi pemasok penting bagi Korea Selatan dalam hal sumber daya alam seperti batu bara, karet, minyak sawit, dan hasil pertanian lainnya. Meskipun kedua negara telah menandatangani perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN–Korea Free Trade Agreement (AKFTA), keduanya setuju bahwa mekanisme regional tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan khusus kedua negara. Akibatnya, diperlukan perjanjian ekonomi bilateral yang luas.

ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), yang ditandatangani pada Agustus 2006, memungkinkan Korea Selatan untuk berhubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. AKFTA meningkatkan integrasi ekonomi Asia Tenggara dengan mengurangi hambatan perdagangan tarif dan non-tarif antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN. Akibatnya, Korea Selatan dan Indonesia sepakat pada Februari 2011 untuk membentuk Joint Study Group (JSG) untuk mengkaji pembentukan free trade agreement (FTA) bilateral. JSG dibentuk dengan dilatarbelakangi oleh kesadaran kedua negara akan kepentingannya dalam kerjasama ekonomi bilateral di luar jangkauan kerjasama multilateral seperti ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan telah berkembang pesat sejak hubungan diplomatik dimulai pada tahun 1973, potensi kerjasama belum begitu optimal maka dari itu dibentuklah Join Study Group (JSG) sebagai forum kajian awal untuk meneliti kelayakan dibentuknya *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

Kajian JSG akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah perundingan FTA akan dilanjutkan atau tidak. Tujuan utama dari JSG adalah untuk melakukan studi kelayakan terhadap kemungkinan dibentuknya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang mencakup berbagai sektor seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama pembangunan ekonomi. Hasil kajian dari JSG menunjukkan bahwa perjanjian CEPA akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan meluncurkan perundingan Kerjasama IK-CEPA pada Juli 2012 dengan pembahasan Term of Reference negosiasi dan cakupan IK-CEPA dengan dibentuk tujuh Working Groups, perundingan tersebut berlangsung selama tujuh putaran hingga tahun 2014 dihentikan sementara karena belum tercapai kesepakatan klausul investasi dan terdapat kondisi politik domestik Indonesia yang sedang terjadi tidak stabil ditandai dengan pergantian Presiden yang mengakibatkan perundingan tersebut ditunda untuk sementara waktu.<sup>11</sup> Perjanjian kerjasama IK-CEPA dimulai kembali pada Februari 2019 putaran kedelapan dimulai di Seoul pada April-Mei 2019 dengan tujuan selesai pada akhir 2019. Pada Tanggal 18 Desember 2020, Seoul sebagai kesepakatan final dan penandatanganan IK-CEPA dan pada tanggal 30 Agustus 2022 Ratifikasi perjanjian oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2022, dan implementasi perjanjian ditargetkan mulai Januari 2023.

*Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* merupakan bentuk perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan membangun kerja sama ekonomi yang menyeluruh antara dua negara atau lebih. CEPA mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights/IPR), yang merupakan hasil dari kreativitas dan kemampuan intelektual manusia. Berbeda dengan *Free Trade Agreement (FTA)* yang umumnya hanya menekankan pada penghapusan tarif dan hambatan perdagangan, CEPA memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mencakup aspek regulasi dan kerja sama ekonomi strategis. Oleh karena itu, CEPA

---

<sup>11</sup> KEMENDAGRI, “Indonesia-Korea CEPA”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <https://kadi.kemendag.go.id/perjanjian-dagang/ik-cepa> , diakses pada 29 April 2025

dapat dipahami sebagai instrumen perjanjian ekonomi yang bertujuan meningkatkan hubungan dagang dan investasi secara lebih komprehensif.<sup>12</sup>

Kerjasama IK-CEPA pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di Jakarta untuk membahas perundingan *Term of Reference* dan cakupan IK-CEPA yang diwakili oleh perwakilan dari masing-masing kedua negara, dengan bertujuan untuk melanjutkan apa yang sudah disepakati sebelumnya untuk memperjelas bentuk kerjasama bagi kedua belah pihak dan pada putaran tersebut menghasilkan persetujuan untuk membentuk Working Group yang berfokus pada aktivitas dari perdagangan barang antara Indonesia dan Korea Selatan. Pembentukan IK-CEPA juga dilakukan untuk melengkapi perjanjian Free Trade Area (FTA) ASEAN-ROK yang sudah ada. Pertemuan ketujuh IK-CEPA telah berlangsung, tetapi belum ada kemajuan yang dicapai. Perundingan IK-CEPA memulai fase baru hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang diharapkan menguntungkan ekonomi bagi kedua negara tersebut.<sup>13</sup> *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) merupakan bukti nyata komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan bilateral, meskipun tengah menghadapi tantangan dari situasi ekonomi global yang tidak menguntungkan. Perjanjian ini, yang merupakan bentuk kerja sama perdagangan dan investasi dalam kerangka CEPA, berhasil diwujudkan melalui fasilitasi *Joint Study Group* (JSG). Tujuan utama dari IK-CEPA adalah untuk memperkuat hubungan dagang dan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dengan cara menghapus berbagai hambatan perdagangan yang masih tersisa, baik dalam sektor barang maupun jasa. Selain itu, perjanjian ini tidak hanya memperluas kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga menciptakan kerangka kelembagaan yang komprehensif guna mendukung kolaborasi lintas batas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup>Achmad Ismail, Darynaufal Mulyaman, 2018, “Pendekatan Behaviorisme dan Kendala Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)”, *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 2, hlm. 33-45

<sup>13</sup>Rebeca Pratiwi Indonesia Rompas, 2019, “Hubungan Dagang Indonesia dan Korea Selatan 2011-2016”, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 8, No.1

<sup>14</sup>Ulim Maidatul Cholif, Arie Kusuma Paksi, 2022, “South Korea’s Interests behind the Reactivation of IK CEPA Negotiations with Indonesia”, *Insignia: Journal of International*, Vol. No. 1

Tahun 2012 menjadi momentum awal perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) berlangsung, tetapi di tahun 2014 negosiasi pun dihentikan pada putaran ketujuh dikarenakan belum tercapainya kesepakatan substantif antara kedua negara terkait substansi dan bentuk kerja sama yang dirancang. Ketidaksepehaman tersebut mencerminkan adanya perbedaan persepsi mengenai manfaat ekonomi dan potensi risiko yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut, baik bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Akibatnya, proses negosiasi diputuskan untuk ditunda hingga diperoleh titik temu yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Selain faktor teknis, dinamika politik domestik turut memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan negosiasi.<sup>15</sup> Pergantian pemerintahan di Indonesia dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 membawa perubahan orientasi kebijakan dan prioritas nasional, yang berimplikasi langsung pada sikap pemerintah terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang sedang dalam proses. Fokus pemerintah baru terhadap isu-isu pembangunan domestik serta peninjauan ulang terhadap kerja sama internasional membuat proses negosiasi IK-CEPA harus mengalami penundaan. Kondisi ini diperparah oleh adanya perbedaan kepentingan nasional dan kalkulasi keuntungan serta risiko ekonomi yang dianggap belum optimal bagi masing-masing pihak. Dengan pertimbangan tersebut, baik Indonesia maupun Korea Selatan sepakat untuk menghentikan sementara proses perundingan hingga kondisi lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tiara, A. C. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terhentinya Perundingan *Indonesia Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA)* Di Tahun 2014 (Universitas Katolik Parahyangan, 2017) (pp. 91-93). Bandung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP

<sup>16</sup> Ibid.



**Gambar 2.1** Pertemuan putaran ke-08 30 April - 2 Mei 2019 Seoul, Korea Selatan  
(Sumber dari Kementerian Perdagangan Indonesia)

Setelah mengalami penundaan sejak tahun 2014, perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pun secara resmi diaktifkan kembali pada 19 Februari 2019 oleh Menteri Perdagangan kedua negara. Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral di tengah dinamika ekonomi global yang menantang. Putaran kedelapan perundingan dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei 2019 di Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, dibentuk tiga kelompok kerja utama yang membahas perdagangan barang, jasa, serta aturan asal barang dan prosedur kepabeanan. Selain itu, diadakan dialog bisnis antara ketua tim perunding dan pelaku usaha Korea Selatan guna memperoleh masukan terkait peningkatan kerja sama ekonomi. Putaran ini menjadi momentum penting dalam menegosiasikan isu-isu teknis yang sebelumnya tertunda, termasuk akses pasar, ketentuan investasi, kerja sama jasa, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam proses ini, kedua negara menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk menyelesaikan perjanjian, Perundingan berlanjut secara intensif dengan target penyelesaian substansi perjanjian pada akhir 2019. Pada 16 Oktober 2019, di sela pembukaan *Trade Expo* Indonesia di Tangerang, diumumkan bahwa substansi perundingan IK-CEPA telah berhasil diselesaikan. Penyelesaian ini menandai pencapaian penting dalam hubungan ekonomi kedua negara.<sup>17</sup>

Dengan melalui proses negosiasi yang berlangsung lebih dari sepuluh tahun, Indonesia dan Korea Selatan secara resmi menyelesaikan tahap akhir perundingan

<sup>17</sup> Tempo, “Kemitraan Indonesia-Korea Selatan Memasuki Babak Baru”, <https://www.tempo.co/info-tempo/kemitraan-indonesia-korea-selatan-memasuki-babak-baru--695093>, Tempo.co Diakses pada 1 Mei 2025

*Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* pada tanggal 18 Desember 2020. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di Seoul oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto, bersama dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Republik Korea, Sung Yun-mo. Perjanjian tersebut mencakup penghapusan tarif atas sekitar 95 persen produk ekspor Indonesia ke Korea Selatan, serta memperkuat kolaborasi di sektor jasa, investasi, dan kekayaan intelektual. Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya kerja sama strategis antara kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi global pasca-pandemi COVID-19. Bagi Korea Selatan, Indonesia dipandang sebagai pasar yang menjanjikan di kawasan Asia Tenggara, dengan keunggulan sumber daya alam dan populasi yang besar. Sebaliknya, bagi Indonesia, Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang dan investor utama, khususnya dalam sektor industri, energi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, IK-CEPA diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan daya saing nasional serta menarik investasi asing langsung (FDI) secara lebih signifikan.

Setelah ditandatangani, perjanjian ini harus melalui proses ratifikasi di masing-masing negara. Di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui persetujuan DPR RI bersama Pemerintah yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan IK-CEPA, yang disahkan pada tanggal 30 Agustus 2022. Dalam proses pembahasan, DPR menilai perjanjian ini sebagai langkah strategis untuk memperluas pasar ekspor Indonesia dan meningkatkan nilai tambah dari perdagangan luar negeri.<sup>18</sup>

Perjanjian IK-CEPA mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2023 setelah proses ratifikasi diselesaikan oleh kedua belah pihak. Implementasi perjanjian ini mencakup berbagai kebijakan, seperti penurunan tarif,

---

<sup>18</sup> Database Peraturan, “Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea*)”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228475/uu-no-25-tahun-2022>, diakses pada 1 Mei 2025

penyederhanaan prosedur ekspor-impor, peningkatan kerja sama di sektor industri strategis seperti otomotif dan elektronik, serta penguatan kemitraan dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekspor non-migas ke Korea Selatan dan pemberdayaan UMKM agar lebih kompetitif di pasar global. Secara keseluruhan, pelaksanaan IK-CEPA menandai babak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia–Korea Selatan. Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, serta kemitraan jangka panjang antara negara berkembang dan negara industri.<sup>19</sup>

## **2.2. Tujuan Pembentukan**

Pembentukan Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara dengan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para investor di kedua negara untuk beroperasi. Adapun beberapa tujuan perjanjian ini antara lain:

1. Meningkatkan akses pasar bagi Barang dan Jasa, IK-CEPA bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan antara kedua negara, seperti tarif dan hambatan non-tarif. Hal ini akan membuka peluang akses pasar yang besar bagi produk dan jasa dari kedua negara.
2. Meningkatkan investasi, perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan dapat memfasilitasi aliran investasi antara kedua negara. Hal ini meliputi perlindungan hukum bagi para investor, kepastian hukum, dan peningkatan kerjasama dalam bidang investasi.

---

<sup>19</sup>Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation Indonesia, South Korea Officially Implement IK-CEPA, 3 Januari 2023, <https://setkab.go.id/en/indonesia-south-korea-officially-implement-ik-cepa/> diakses pada 1 Mei 2025

3. Meningkatkan kerjasama ekonomi, IK-CEPA juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri manufaktur, pertanian, perikanan, energi, dan teknologi informasi. Melalui kerjasama ini, kedua negara dapat saling menguntungkan dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis.
4. Meningkatkan diversifikasi mitra dagang dan penguatan posisi Geopolitik, secara strategis IK-CEPA juga merupakan bagian dari upaya diversifikasi mitra dagang Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada pasar internasional seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam konteks Geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian perjanjian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang dan investasi yang kredibel di kawasan. Bagi Korea Selatan kerjasama ini memperkuat strategi *New Southern Policy* yang bertujuan untuk mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara.

Perjanjian IK-CEPA diharapkan dapat berperan sebagai fondasi strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan secara berkelanjutan. Tujuan-tujuan yang terkandung dalam perjanjian ini merefleksikan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan serta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kedua negara.

### **2.3 Perkembangan Sejak Awal Hingga Saat ini dan Komponen Utama Perjanjian meliputi tarif, Perdagangan Barang dan Investasi**

Negosiasi Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) secara resmi dimulai pada tahun 2012, sebagai respons terhadap kebutuhan kedua negara untuk memperdalam kerja sama ekonomi yang lebih inklusif dan saling menguntungkan. Namun, proses tersebut mengalami jeda pada tahun 2014 akibat perbedaan fokus dan prioritas kebijakan ekonomi domestik masing-masing pihak. Pembicaraan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2019, didorong oleh komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi serta menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global.

Hingga pada akhirnya perjanjian IK-CEPA secara resmi ditandatangani pada 18 Desember 2020 dan mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2023. Momentum implementasi tersebut bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan sebagai tanda tonggak penting dalam sejarah kerjasama bilateral kedua negara. Secara strategis, Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) tidak hanya merepresentasikan penguatan komitmen ekonomi bilateral, melainkan juga sejalan dengan kebijakan regional Korea Selatan yang dikenal sebagai *New Southern Policy* (NSP). NSP, yang diumumkan pada November 2017 di Indonesia, bertujuan untuk memperdalam hubungan strategis Korea dengan ASEAN dan India dalam upaya mewujudkan komunitas yang berpusat pada rakyat, damai, dan sejahtera. Dalam konteks ini, IK-CEPA menjadi instrumen penting bagi Korea Selatan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia, perjanjian ini membuka peluang untuk memperluas akses pasar ekspor, menarik investasi berkualitas tinggi, serta memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Asia Timur dan juga menjadi sumber penting investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Melalui IK-CEPA, hubungan ekonomi ini diperkuat lebih lanjut melalui komitmen bersama dalam memfasilitasi arus perdagangan, mengurangi hambatan non-tarif, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan menarik. Selain aspek ekonomi, perjanjian ini juga mencakup dimensi kerja sama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan vokasi, serta alih teknologi, yang keseluruhannya diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) menetapkan sejumlah ketentuan teknis dan substantif yang membentuk kerangka dasar implementasi perjanjian. Secara umum, perjanjian ini dibangun atas tiga komponen utama, yakni liberalisasi tarif, penguatan perdagangan barang, dan pengaturan terkait investasi. Ketiga pilar ini dirancang secara terpadu untuk mendorong

peningkatan efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta membangun kepercayaan pelaku usaha di kedua negara dalam jangka panjang.

#### 1. Liberasi Tarif

Salah satu komitmen utama dalam IK-CEPA dalam penghapusan tarif secara bertahap agar sebagian besar produk yang diperdagangkan antar kedua negara. Korea Selatan menyetujui penghapusan tarif atas 95,5% dari total pos tarif produk Indonesia. Produk yang diuntungkan antara lain perikanan, pertanian tropis, tekstil, sepeda, sepeda motor, aksesoris kendaraan bermotor, dan alas kaki sedangkan, Indonesia menghapus tarif 94,5% produk asal Korea Selatan, Produk utama yang mendapat manfaat adalah produk industri kimia, elektronik, otomotif, dan komponen elektronik.

#### 2. Perdagangan Barang dan Jasa

IK-CEPA memuat ketentuan mengenai penguatan fasilitasi perdagangan yang difokuskan pada penghapusan hambatan non-tarif, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta harmonisasi standar teknis dan ketentuan. Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih efisien, terbuka, dan transparan. Selain itu, perjanjian ini mencantumkan pengakuan timbal balik terhadap sertifikasi produk, yang secara signifikan dapat menurunkan biaya transaksi dan mempercepat proses akses pasar bagi pelaku usaha di kedua negara.

#### 3. Investasi

ketentuan yang memberikan perlindungan bagi investor, menjamin kepastian hukum, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*. Ketentuan ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan investor asal Korea Selatan dalam menanamkan modal di Indonesia, terutama pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, infrastruktur, teknologi informasi, dan industri manufaktur. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa melalui komitmen tersebut, arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) akan meningkat secara signifikan, sehingga berkontribusi terhadap penciptaan

lapangan kerja serta percepatan alih teknologi dalam perekonomian nasional.

**BAB III**  
**KERJASAMA EKONOMI *INDONESIA-KOREA SELATAN***  
***COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)***

**3.1 KERJASAMA SEBELUM IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN**

Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) merupakan puncak rangkaian proses panjang yang mencerminkan intensifikasi hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Sebelum diresmikan pada 1 Januari 2023, kesepakatan ini telah melalui tahapan awal yang berupa inisiasi, perundingan strategis, serta penandatanganan dokumen resmi yang menjadi refleksi dari semakin menguatnya kerjasama bilateral kedua negara dalam ranah ekonomi global dan internasional<sup>20</sup>.

Sebelum implementasi Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin dalam berbagai sektor terutama di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Kerja sama ini mengalami perkembangan yang cukup dinamis sejak pembentukan kemitraan strategis pada tahun 2006 yang kemudian diperkuat melalui peningkatan menjadi kemitraan strategis khusus pada tahun 2017.

Secara historis, momentum penting dimulai pada tahun 2006 ketika Indonesia dan Korea Selatan secara resmi membentuk Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) yang menjadi landasan bagi kerjasama lintas sektor. Dalam kerangka ini, kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi, terutama melalui peningkatan perdagangan barang dan jasa serta investasi langsung. Selanjutnya pada tahun 2017 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership atau kemitraan strategis khusus, yang menunjukkan kedekatan hubungan diplomatik dan komitmen politik yang lebih dalam antara Indonesia dan Korea Selatan. Peningkatan status ini memperluas cakupan

---

<sup>20</sup> Komite Anti Dumping Indonesia, “Indonesia-Korea CEPA”, “Kementerian Perdagangan Indonesia”, <https://kadi.kemendag.go.id/perjanjian-dagang/ik-cepa> , diakses 12 Mei 2025.

kerjasama ke bidang keamanan, pertahanan, serta kolaborasi dalam isu-isu regional dan global<sup>21</sup>.

Pembentukan Joint Study Group (JSG) pada tahun 2007 adalah langkah pertama menuju kemitraan ekonomi yang lebih kuat. Tujuan JSG adalah untuk mengevaluasi kemungkinan dan kelayakan membangun perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara. Hasil dari pembentukan JSG menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar bagi kedua belah pihak untuk memperkuat integrasi ekonomi perdagangan bebas kerja sama yang mencakup berbagai sektor seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama pembangunan ekonomi. Hasil kajian dari JSG menunjukkan bahwa perjanjian CEPA akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan meluncurkan perundingan resmi IK-CEPA pada Juli 2012.

Namun, negosiasi sempat terhenti selama beberapa tahun karena dinamika domestik yang terjadi di kedua negara dan dilanjutkan kembali pada tahun 2019. Dalam rentang waktu tersebut, kedua negara tetap menjalin hubungan ekonomi melalui mekanisme *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA) yang diimplementasikan sejak tahun 2010. Dengan adanya AKFTA, Korea Selatan menjadi mitra dagang strategis Indonesia dengan peningkatan nilai perdagangan bilateral. Nilai perdagangan Indonesia-Korea Selatan pada tahun 2017 tercatat sebesar USD 17,975 miliar, meskipun sempat berubah pada tahun-tahun sebelumnya<sup>22</sup>.

Sebagai salah satu mitra dagang utama ASEAN, telah berkomitmen untuk mengeliminasi tarif bea masuk terhadap lebih dari 90% pos tarif barang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dalam jangka waktu yang ditentukan. Sebagai bentuk resiprositas, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, juga

---

<sup>21</sup>Kementerian Sekretariat Negara, Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Kemitraan Strategis, 28 Juli 2023, [<sup>22</sup> Ibid](https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_korea_selatan_sepakat_tingkatkan_kemitraan_strategis#:~:text=%E2%80%9CDalam%20pertemuan%20dengan%20Presiden%20Yoon,listrik%2C%E2%80%9D%20kata%20Presiden%20Jokowi, diakses 12 Mei 2025.</a></p></div><div data-bbox=)

menyusun rencana penghapusan tarif atas produk asal Korea Selatan, yang diklasifikasikan ke dalam dua jalur liberalisasi, yakni *normal track* dan *sensitive track*.

Dalam mekanisme *normal track*, negara-negara ASEAN-6—yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam—diharuskan menyelesaikan penurunan tarif hingga mencapai tingkat 0% dalam rentang waktu antara tahun 2007 hingga 2012. Sementara itu, negara-negara ASEAN yang tergolong sebagai CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) memperoleh kelonggaran waktu hingga tahun 2018 untuk menyelesaikan komitmen serupa. Komoditas utama ASEAN yang memperoleh manfaat dari penghapusan tarif oleh Korea Selatan mencakup produk elektronik, tekstil, karet alam dan olahan, hasil perikanan, serta produk agrikultur yang telah diproses. Sebaliknya, negara-negara ASEAN memberikan penurunan tarif bagi berbagai produk unggulan Korea Selatan seperti kendaraan bermotor, mesin industri, baja, serta barang-barang berbasis teknologi tinggi<sup>23</sup>.

Sektor investasi, Korea Selatan merupakan salah satu investor asing terbesar di Indonesia, terutama di sektor industri manufaktur, otomotif, baja, dan teknologi. Menurut pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dimulainya kembali pembahasan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada tahun 2019 memberikan peluang strategis bagi penguatan hubungan investasi bilateral, terutama melalui keterlibatan dua perusahaan besar asal Korea Selatan, yaitu Hyundai Motors dan Lotte Chemical. Hyundai Motors menyatakan komitmennya untuk menanamkan modal hingga sebesar USD 1 miliar di Indonesia, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi kendaraan nasional. Di sisi lain, Lotte Chemical berencana mengalokasikan investasi senilai USD 3 miliar guna membangun fasilitas petrokimia melalui kerja sama strategis dengan perusahaan nasional Chandra Asri.

Selain kedua korporasi tersebut, implementasi awal IK-CEPA juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan kawasan industri strategis seperti Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) di Jawa Timur.

---

<sup>23</sup>Theresia, Dampak ASEAN-Korea Free Trade Area Terhadap Investasi Asing dan Wisatawan Asing di ASEAN (2015-2018). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia, Repository@uki.ac.id, 2021, diakses 10 Juni 2025.

Pemerintah menilai bahwa investor asal Korea Selatan memiliki kapabilitas yang memadai dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri, sejalan dengan program nasional untuk mempercepat transformasi kawasan industri terpadu. Oleh karena itu, proses negosiasi IK-CEPA dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri seperti JIPE terhadap investor Korea Selatan secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang<sup>24</sup>.

meskipun Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) baru mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2023, dasar-dasar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan telah terbangun jauh sebelum implementasi tersebut. Fondasi ini terbentuk melalui keterlibatan kedua negara dalam berbagai perjanjian multilateral, seperti ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), serta melalui pelaksanaan program-program bilateral yang bersifat sektoral dan strategis, yang secara bertahap memperkuat hubungan ekonomi dan membuka jalur menuju perjanjian yang lebih komprehensif.

### **3.2 KERJASAMA SETELAH IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN**

Setelah diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2023, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) telah menunjukkan berbagai dinamika positif dalam hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Pelaksanaan ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, khususnya di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya.

#### **3.2.1 Penghapusan Tarif**

Kerjasama IK-CEPA membantu Indonesia menikmati sejumlah manfaat, termasuk penghapusan 95,54% hambatan tarif Korea Selatan atas perdagangan barang, setara dengan 11.686 baris tarif. Barang-barang tertentu, seperti kaos, bahan kayu olahan (blockboard), produk buah kering, bahan dasar minyak pelumas, rumput laut, dan asam stearat, akan mendapatkan perlakuan penghapusan tarif. Sebaliknya, Indonesia telah memberikan penghapusan tarif sebesar 92,06% kepada

---

<sup>24</sup> Andhira Prameswari Maharani, *Implementasi Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership, Agreement (IK-CEPA) terhadap Perekonomian Indonesia, Perjanjian Internasional*. 2023. Hlm 11-12.

Korea Selatan, dengan 9.954 baris tarif. Produk yang akan dibebaskan dari pajak oleh Indonesia meliputi dinding, paving, transmisi kendaraan, dan bahan perapian. Selain itu, berdasarkan peraturan rezim perdagangan yang berlaku, termasuk aturan jalur normal dan jalur sensitif untuk jalur tarif sensitif dan sangat sensitif, barang tarif sensitif, Korea Selatan telah setuju untuk menghapuskan tarif atas ekspor Indonesia dalam kategori jalur normal sebesar 0%. Ini termasuk produk hewan seperti ikan dan hewan hidup, produk tumbuhan seperti sayuran dan minyak kelapa sawit, produk tekstil dan barang tekstil jadi, produk kimia, produk pulp atau kertas, produk kulit, produk kayu, dan produk alas kaki<sup>25</sup>.

Dari perspektif Marxis Gilpin, jenis perdagangan bebas seperti ini harus dipertimbangkan karena dapat memperkuat kekuatan negara-negara industri atas negara-negara berkembang melalui pengendalian rantai nilai global. Produk-produk Korea Selatan yang bernilai tambah tinggi dapat membanjiri pasar domestik Indonesia, melemahkan industri lokal, dan menciptakan ketergantungan struktural pada barang-barang impor. Karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, pekerja sektor informal dan pengusaha mikro di Indonesia adalah pihak yang paling rentan terhadap liberalisasi.

### **3.2.2 Investasi**

Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) merupakan suatu bentuk kerja sama ekonomi bilateral yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan perjanjian perdagangan bebas pada umumnya. Tidak hanya berfokus pada liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan investasi, IK-CEPA juga mencakup berbagai aspek strategis lain seperti bantuan ekonomi, kerja sama di bidang teknologi, pengembangan energi terbarukan, serta proyek-proyek khusus yang bersifat sektoral dan bilateral. Sebagai bagian dari implementasi kerja

---

<sup>25</sup> Nana Triharyanti dkk, “Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022”, *Administrasi-Jurnal ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol.7 No.3, September 2023, hlm. 7-8

[https://www.researchgate.net/publication/377860554\\_Analisis\\_Kepentingan\\_Ekonomi\\_Politik\\_Indonesia\\_Terdapat\\_Reaktivasi\\_Perjanjian\\_IK-CEPA\\_Indonesia-Korea\\_Comprehensive\\_Economic\\_Partnership\\_Agreement\\_Tahun\\_2019-2022](https://www.researchgate.net/publication/377860554_Analisis_Kepentingan_Ekonomi_Politik_Indonesia_Terdapat_Reaktivasi_Perjanjian_IK-CEPA_Indonesia-Korea_Comprehensive_Economic_Partnership_Agreement_Tahun_2019-2022), diakses 16 Juni 2025

sama ini, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan intensifikasi yang signifikan, ditandai oleh meningkatnya arus investasi dan kerja sama strategis, termasuk dalam bidang pertahanan. Salah satu wujudnya adalah pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), seperti kapal selam dan pesawat militer oleh Indonesia yang dibeli dari Korea Selatan, sebagai bagian dari penguatan sektor pertahanan nasional

Selain itu, kerja sama di sektor industri juga mengalami penguatan melalui pembentukan usaha patungan, seperti Krakatau POSCO yang merupakan kolaborasi antara PT Krakatau Steel (Indonesia) dan Pohang Iron and Steel Company (POSCO) dari Korea Selatan. Dalam sektor investasi, Korea Selatan tercatat sebagai salah satu mitra investasi terbesar Indonesia, terutama pada sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, otomotif, baja, dan teknologi tinggi. Investasi oleh perusahaan besar asal Korea Selatan seperti Hyundai Motor Company, Lotte Group, Hankook Tire, KEB Hana Bank, Shinhan Financial Group, hingga Samsung telah memperkuat posisi Korea Selatan sebagai mitra ekonomi yang signifikan bagi Indonesia bahkan sebelum IK-CEPA secara resmi diimplementasikan<sup>26</sup>.

Pendekatan Marxisme Robert Gilpin arus investasi asing merupakan bukti dari ekspansi modal global yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi kelas kapitalis internasional, bukan sekadar aliran modal netral. Negara penerima seperti Indonesia berada dalam posisi subordinat dan menawarkan insentif fiskal dan tenaga kerja murah untuk menarik para investor. Pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan terhadap modal asing dan mempersempit ruang kebijakan ekonomi yang menguntungkan rakyat.

### **3.3.3 Kerjasama Ekonomi**

Secara keseluruhan, implementasi Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) berkontribusi signifikan dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara. Perjanjian ini tidak

---

<sup>26</sup> Anto Purwanto, *Dampak Implementasi IK-CEPA terhadap Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia-Korea Selatan*, *Jurnal Review dan Pengajaran, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* vol 7.No 2, (2024), hlm. 5

hanya memperkuat sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga membentuk suatu kerangka kelembagaan yang menyeluruh sebagai fondasi kerja sama ekonomi jangka panjang. IK-CEPA dirancang dengan mempertimbangkan struktur ekonomi masing-masing negara, sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang saling melengkapi dan berkelanjutan.

Dalam konteks kepentingan nasional Indonesia, terdapat beberapa tujuan utama dari perjanjian ini. Pertama, dari sisi ekonomi, IK-CEPA diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai perdagangan dan investasi bilateral, yang dibuktikan dengan dibukanya lebih dari 100 subsektor jasa bagi kepemilikan asing serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, dalam aspek pertahanan, perjanjian ini memperkuat hubungan strategis melalui kolaborasi militer, seperti pengembangan kapal selam dan pesawat tempur, yang turut memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia. Ketiga, dari perspektif tata dunia atau kepentingan global, IK-CEPA menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Keempat, dalam ranah budaya, kerja sama ini juga berfungsi sebagai medium diplomasi budaya, dengan tujuan meningkatkan eksposur budaya Indonesia di Korea Selatan serta mendorong ketertarikan masyarakat Korea terhadap Indonesia.

Dengan demikian, IK-CEPA tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan militer, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan bilateral, regional, dan internasional antara Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan multidimensional<sup>27</sup>. Dalam kerangka teori ekonomi politik internasional dengan pendekatan Marxisme Robert Gilpin, perlu dipertanyakan sejauh mana kerja sama tersebut benar-benar mencerminkan prinsip pembangunan yang adil dan merata. Marxisme memandang bahwa institusi ekonomi global, termasuk perjanjian perdagangan bebas, beroperasi dalam struktur kapitalisme internasional yang cenderung berpihak pada negara-negara yang memiliki kekuatan

---

<sup>27</sup> Anto Purwanto, *Potensi dan Peluang Implementasi Ik-Cepa terhadap Perluasan Akses Pasar Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia Di Pasar Korea Selatan*, *Jurnal Syntax Administration*, vol.5, No.6. (2014) hlm.6-7

modal dan teknologi yang lebih besar. Dalam konteks ini, kerja sama di bidang digitalisasi dan teknologi dapat dipahami bukan semata-mata sebagai upaya peningkatan kapasitas domestik, tetapi juga sebagai instrumen penetrasi ekonomi negara industri maju terhadap negara berkembang.

Seperti yang ditekankan oleh Gilpin, kerja sama ekonomi yang terlihat saling menguntungkan di permukaan seringkali menyembunyikan relasi kuasa yang timpang dan kepentingan kelas global. Dalam hal ini, dominasi Korea Selatan sebagai negara dengan kapabilitas teknologi tinggi dan kekuatan investasi yang besar, berpotensi memperluas ketergantungan struktural Indonesia terhadap arus modal asing, teknologi asing, dan sistem produksi global yang dikendalikan oleh korporasi transnasional.

### **3.3 PERBANDINGAN KESEPAKATAN SEBELUM DAN SESUDAH IK-CEPA DIIMPLEMENTASIKAN**

Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan yang membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan bentuk kerja sama sebelumnya. Sebelum implementasi IK-CEPA pada 1 Januari 2023, hubungan ekonomi kedua negara telah terjalin dalam kerangka kerja sama multilateral seperti ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), serta melalui mekanisme bilateral yang bersifat sektoral dan strategis. Namun, bentuk kerja sama tersebut masih terbatas pada liberalisasi tarif atas perdagangan barang dengan cakupan sektoral yang belum sepenuhnya komprehensif.

Sebelum IK-CEPA diberlakukan, liberalisasi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan difasilitasi oleh AKFTA yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Melalui perjanjian ini, Korea Selatan dan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menyepakati penghapusan tarif secara bertahap terhadap lebih dari 90% pos tarif produk, baik dalam jalur normal maupun jalur sensitif. Meski perjanjian ini berhasil meningkatkan volume perdagangan, cakupan kerjasama masih belum mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti liberalisasi jasa, fasilitas investasi, dan kerja sama teknologi serta inovasi industri.

Sebaliknya, setelah implementasi IK-CEPA, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan berkembang menjadi lebih luas, mendalam, dan terstruktur. IK-CEPA tidak hanya memperluas penghapusan tarif hingga lebih dari 95% pos tarif perdagangan barang, tetapi juga mencakup liberalisasi sektor jasa, penguatan investasi, serta kolaborasi dalam bidang teknologi, pendidikan, energi terbarukan, dan pertahanan. Melalui perjanjian ini, Indonesia berhasil membuka akses pasar jasa di lebih dari 100 subsektor bagi investor Korea Selatan, sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam perjanjian sebelumnya.

Selain itu, sektor investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah diberlakukannya IK-CEPA. Perusahaan-perusahaan besar asal Korea Selatan seperti Hyundai Motors dan Lotte Chemical tidak hanya meningkatkan nilai investasinya, tetapi juga memperluas cakupan proyek strategis di Indonesia, termasuk pembangunan fasilitas industri dan petrokimia. Kerjasama ini diperkuat melalui pembangunan kawasan industri terpadu seperti JIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate), yang didukung oleh kepercayaan investor Korea terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia.

Dari sisi strategis, perjanjian IK-CEPA juga mencerminkan pergeseran dari kerja sama ekonomi konvensional menuju kemitraan multidimensi yang mencakup aspek geopolitik dan keamanan. Kolaborasi dalam sektor pertahanan, seperti pengembangan alutsista dan kapal selam, memperlihatkan bahwa hubungan bilateral tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapabilitas nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IK-CEPA merupakan evolusi dari kerangka kerja sama yang sebelumnya terbatas menjadi suatu model kemitraan yang lebih komprehensif, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Perbedaan utama terletak pada cakupan kerjasama yang lebih luas, tingkat liberalisasi yang lebih dalam, serta pendekatan strategis yang multidimensi, menjadikan IK-CEPA sebagai landasan kuat bagi integrasi ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di masa depan.

### **3.3.1 TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI IK-CEPA**

Salah satu tantangan utama dalam proses internasionalisasi bagi perusahaan adalah kurangnya informasi tentang pasar internasional. Banyak perusahaan,

terutama yang baru memulai ekspansi global, sering menghadapi kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang cara memperkenalkan produk mereka di pasar luar negeri. Keterbatasan pengetahuan tentang dinamika pasar global dan aksesibilitas pasar asing dapat menghambat proses ekspansi dan meningkatkan risiko. Dalam konteks ini, sangat penting bagi perusahaan untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam riset pasar yang menyeluruh dan pengembangan strategi yang dipertimbangkan dengan baik. Pengetahuan yang mendalam mengenai target pasar akan membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan tantangan serta menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dukungan dari lembaga pemerintah dan asosiasi perdagangan juga penting untuk menyediakan informasi yang relevan dan membantu perusahaan dalam menavigasi pasar global.

Selain itu, kendala keuangan merupakan masalah yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal atau lembaga keuangan yang dapat mendukung ekspansi internasional mereka. Sumber daya sering kali digunakan untuk pengembangan pasar domestik, sementara persiapan untuk memasuki pasar luar negeri seringkali terabaikan. Modal ventura, yang dapat berfungsi sebagai pendanaan awal untuk ekspansi internasional, belum sepenuhnya dikembangkan untuk mendukung UMKM secara optimal.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan dukungan keuangan yang dibutuhkan UMKM. Program-program pendukung seperti subsidi, insentif pajak, dan fasilitas pembiayaan khusus dapat membantu mengurangi risiko dan mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan ekspansi internasional. Menyediakan dukungan keuangan yang tepat akan memfasilitasi pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran untuk UMKM dan memperluas jangkauan pasar global mereka<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup>Syuryansyah & Bagaskara Sagita Wijaya, *IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA): AN ANALYSIS OF STRATEGIC AND ECONOMIC IMPACTS ON BILATERAL AND REGIONAL RELATIONS*, *Jurnal SOSIO DIALEKTIKA*, Vol.9, No.2, (2024), hlm 15-17

### 3.3.2 PELUANG IMPLEMENTASI IK-CEPA

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah sekitar 65,46 juta unit usaha, dengan kontribusi sebesar 60,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 14,4% terhadap total ekspor Indonesia. Fakta ini mencerminkan potensi strategis UMKM dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia mendorong penguatan sektor UMKM melalui inisiatif “Making Indonesia 4.0”, Making Indonesia 4.0 adalah suatu gagasan yang disusun oleh Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk menerapkan strategi dan peta jalan industri 4.0 di Indonesia dengan memberikan arah dan strategi yang jelas akan pergerakan industri Indonesia di masa depan yang bertujuan mempercepat transformasi industri melalui digitalisasi dan integrasi teknologi. Making 4.0 ini memiliki fokus pada lima sektor utama yaitu, Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian, Otomotif, Kimia, dan Elektronik<sup>29</sup>.

Salah satu langkah konkret adalah pengembangan sektor e-commerce untuk mendukung peningkatan penjualan produk lokal dan memperkuat citra merek Indonesia di pasar internasional. Pemanfaatan kemitraan strategis dengan Korea Selatan menjadi salah satu pendekatan penting dalam strategi penguatan UMKM nasional. Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, tetapi juga meningkatkan daya saing global melalui promosi efektif dan peningkatan visibilitas merek. Komitmen kedua negara untuk mendorong terbentuknya pasar yang terbuka dan bebas hambatan perdagangan memperkuat sinergi dalam pengembangan ekonomi berbasis inovasi.

Indonesia secara aktif melihat Korea Selatan sebagai mitra strategis dalam mempercepat kemajuan teknologi tinggi. Dukungan dari Korea Selatan, khususnya dalam bidang teknologi informasi, robotika, dan automasi industri, menjadi katalis penting dalam mendorong transformasi digital nasional. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan akses terhadap teknologi mutakhir, tetapi juga membuka peluang baru untuk inovasi, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas sumber

---

<sup>29</sup> Muhammad Taqy Dwi, “South Korea’s Cooperation With Indonesia in the implementation of the New Southern Policy IK-CEPA in the Economic Sector”, *Globalization And Foreign Affairs Journal*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm 3-4

daya manusia. Investasi Korea Selatan di sektor teknologi tinggi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja berkualitas serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja domestik, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Ibid

## BAB IV

### DAMPAK IK-CEPA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA-KOREA SELATAN

#### 4.1 Dampak IK-CEPA terhadap Perekonomian Korea Selatan dan Indonesia

Pada era globalisasi yang semakin mendalam, kerjasama ekonomi Internasional melalui skema perjanjian perdagangan bebas seperti Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) merupakan bagian dari diplomasi ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Perjanjian tersebut juga merupakan kemitraan ekonomi yang mencakup perdagangan bebas global. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) pertama kali ditandatangani pada tahun 2012 dengan tujuan utama meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea. Dan pada tahun 2014, IK-CEPA terpaksa dibatalkan karena beberapa faktor yang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

IK-CEPA ini hadir sebagai manifestasi dari semangat liberalisasi perdagangan dan keterbukaan pasar yang secara normatif ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta mempererat konektivitas dan integrasi regional antar Indonesia dan Korea Selatan. Akan tetapi dalam prakteknya implementasi perjanjian semacam ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen netral pembangunan ekonomi nasional maupun terhadap tatanan politik domestik. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik internasional menjadi alat analisis penting dalam mengevaluasi secara kritis bagaimana kepentingan nasional di konstruksi dan dikompromi dalam kema kerjasama IK-CEPA.

Sebagai bentuk konkret dari penguatan kemitraan strategis melalui skema perdagangan bebas, *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) telah memberikan pengaruh yang substansial terhadap perkembangan dinamika ekonomi dan politik antara kedua negara. Perjanjian ini tidak hanya berperan dalam memperlancar pertukaran barang, jasa, dan investasi, tetapi juga turut memperkuat peran dan posisi strategis Indonesia maupun Korea Selatan dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif dan saling terhubung.

#### 4.1.1 Dampak Ekonomi

**Tabel 4.1 Peningkatan Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan  
Tahun 2020-2023**

Tahun	Ekspor	Impor	Nilai perdagangan (Ekspor + Impor)	Neraca Perdagangan (Ekspor - Impor)
2020	6.507,60	6.849,40	13.357,00	-341,80
2021	8.980,50	9.427,20	18.407,70	-446,70
2022	12.808,70	11.717,90	24.526,60	+1.909,80
2023	10.301,80	10.525,80	20.827,60	-224,00
2024	10.755,04	9.339,11	20.094,15	+1.415,93

*(sumber Badan Pusat Statistik Indonesia)*

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) memberikan akses yang lebih luas untuk ekspor Indonesia, khususnya dari sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Korea Selatan telah menghapus tarif impor hingga 95,5% dari pos tarif untuk produk Indonesia membuka peluang besar bagi eksportir dalam negeri besaran penghapusan pos tarif Korea Selatan sekitar 5,5% lebih tinggi dari komitmen di ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) yang mencapai 90% pos tarif <sup>31</sup>. Sebaliknya, Indonesia memberikan 92% dari keseluruhan pos tarif barang yang diimpor dari Korea Selatan sehingga menciptakan hubungan timbal balik yang mendukung peningkatan nilai perdagangan bilateral yang berkelanjutan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa aktivitas ekspor dan impor Indonesia sepanjang periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi

<sup>31</sup> Cahya Puteri Abdi Rabbi, "Implementasi IK-CEP, 11.687 Produk Ekspor RI Bebas Bea Masuk Korsel", *katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/industri/61b012e024f3c/implementasi-ik-cepa-11687-produk-ekspor-ri-bebas-bea-masuk-korsel>, diakses pada 12 Juni 2025.

yang cukup signifikan. Nilai total perdagangan luar negeri Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan angka **Rp 24.526,60 miliar**, sebelum menurun kembali pada dua tahun berikutnya.

Pada tahun 2020, Faktor tersebut diakibat oleh dinamika perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mengalami tekanan yang signifikan yang diakibatkan COVID-19 yang melanda kedua negara tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, tercermin dari stabilitas volume perdagangan dan kesinambungan erus ekspor-impor. Komoditas utama yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ini secara dominan berasal dari sektor energi, pertambangan, pertanian, dan industri manufaktur. nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar Rp 6.507,60 miliar, sementara impor sedikit lebih tinggi, yaitu Rp 6.849,40 miliar, sehingga menghasilkan defisit neraca perdagangan sebesar **Rp -341,80 miliar**, dengan komoditas utama ekspor Indonesia ke Korea Selatan meliputi Batu Bara, Minyak Kelapa Sawit, Karet Alam, Bijih Nikel, dan Feronikel, serta produk kayu olahan dan Furnitur. Komoditas tersebut mencerminkan kebutuhan energi, bahan baku, industri, serta konsumsi rumah tangga di pasar Korea Selatan. Komoditas Impor dari Korea Selatan mencakup Mesin dan Peralatan Mekanik, Komponen Elektronik dan Semikonduktor, Produk Kimia dan Petrokimia, serta Kendaraan bermotor dan Suku Cadang.

pada tahun 2021, di mana ekspor naik menjadi Rp 8.980,50 miliar, namun impor juga meningkat menjadi Rp 9.427,20 miliar, yang mengakibatkan defisit lebih besar sebesar **Rp -446,70 miliar**, atau meningkat sekitar **30,70%** dibanding defisit tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 merupakan periode awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Peningkatan ini didorong oleh permintaan global yang mulai pulih, harga komoditas dunia yang membaik, serta penguatan rantai pasok industri. Dari sisi ekspor Batu Bara sebagai sumber energi industri, serta Bijih Nikel & Feronikel yang mendukung pengembangan industri baterai kendaran listrik yang sejalan dengan investasi *LG Energy Solution* di Indonesia, Minyak Kelapa Sawit, Karet Alam, Produk Baja Tahan Karat juga mengalami peningkatan permintaan terutama untuk sektor

manufaktur dan otomotif. Sementara itu, untuk impor Indonesia dari Korea Selatan didominasi oleh Mesin dan Peralatan Mekanik, Komponen Elektronik dan Semikonduktor, serta Produk Kimia dan Plastik yang dibutuhkan industri nasional. Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang juga tercatat sebagai komoditas impor utama sejalan dengan pertumbuhan konsumsi domestik dan ekspansi Hyundai investasi sektor otomotif Korea Selatan di Indonesia.

Perubahan positif terjadi pada tahun 2022. Pada tahun ini, ekspor Indonesia mengalami lonjakan menjadi Rp 12.808,70 miliar, melampaui nilai impor sebesar Rp 11.717,90 miliar. Kondisi ini mengubah arah neraca perdagangan menjadi surplus sebesar **Rp 1.090,80 miliar**, mencatat peningkatan sebesar **344,19%** dibandingkan defisit tahun sebelumnya. Peningkatan ini diduga berkaitan dengan pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan naiknya harga komoditas ekspor utama Indonesia, ditandai dengan momentum pemulihan ekonomi global pasca pandemi yang semakin kuat, serta meningkatnya ketegangan geopolitik global akibat konflik Rusia–Ukraina. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga energi dan bahan mentah, yang secara langsung memengaruhi nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Untuk ekspor komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan meliputi batu bara Sebagai komoditas utama, peningkatan harga energi di tingkat global memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kinerjanya, bijih nikel dan, minyak kelapa sawit, baja tahan karat, serta furnitur dan kayu olahan. Sementara itu, komoditas impor utama dari Korea Selatan ke Indonesia mencakup mesin dan peralatan mekanik untuk mendukung industrialisasi dan modernisasi manufaktur nasional, komponen elektronik dan semikonduktor komoditas penting seiring berkembangnya sektor digital dan otomotif di Indonesia, produk kimia dan plastik, serta kendaraan bermotor dan suku cadang.

Namun, pada 2023, surplus tersebut tidak berlanjut. Walaupun nilai ekspor masih relatif tinggi (Rp 10.301,80 miliar), impor justru meningkat menjadi Rp 10.525,80 miliar. Hal ini menyebabkan neraca perdagangan kembali defisit sebesar **Rp -224,00 miliar** karena pertumbuhan ekspor tidak mampu mengimbangi lonjakan impor. Perdagangan Indonesia-Korea Selatan mengalami peningkatan secara moderat, meskipun tetap terpengaruh oleh dinamika global seperti krisis

rantai pasok, inflasi energi, dan ketegangan geopolitik yang berkelanjutan. Dari sisi ekspor Batu bara tetap menjadi andalan ekspor Indonesia, meskipun permintaannya mulai melambat seiring percepatan transisi energi di Korea Selatan. Di sisi lain, bijih nikel dan feronikel mencatat pertumbuhan positif, sejalan dengan keberlanjutan investasi Korea di sektor baterai kendaraan listrik di Indonesia. Komoditas lain seperti minyak kelapa sawit dan baja tahan karat juga terus diekspor dalam volume tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan konstruksi. Sementara itu, furnitur dan produk kayu olahan tetap berkontribusi didorong oleh stabilitas permintaan pasar konsumen Korea. Dari sisi impor, Indonesia masih banyak mendatangkan mesin, peralatan industri, serta komponen elektronik dan semikonduktor yang mendukung sektor manufaktur, otomotif, dan digitalisasi nasional. Produk kimia dan plastik juga memegang peranan penting, terutama bagi industri kosmetik, tekstil, dan pangan. Selain itu, kendaraan bermotor dan suku cadang menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan pertumbuhan konsumsi otomotif domestik serta ekspansi merek Korea di pasar Indonesia.

Kondisi membaik pada tahun 2024, ketika ekspor Indonesia meningkat menjadi Rp 10.755,04 miliar, sementara impor menurun ke Rp 9.339,11 miliar. Neraca perdagangan pun kembali mencatatkan surplus sebesar **Rp 1.415,93 miliar**, meningkat tajam sekitar **731,21%** dari defisit tahun sebelumnya. Surplus ini memperlihatkan dampak positif dari kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk pelaksanaan **Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA)**, yang membuka akses pasar ekspor lebih luas.

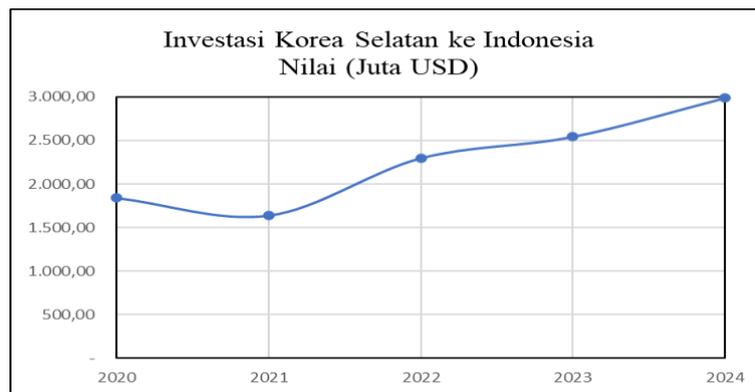
Secara keseluruhan, dalam rentang waktu lima tahun, ekspor Indonesia meningkat sekitar **65,21%**, sedangkan impor hanya naik sekitar **36,29%**. Capaian ini menunjukkan penguatan daya saing produk domestik di pasar internasional serta peran penting sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi perjanjian kerja sama ekonomi ini dirancang untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral, mendorong peningkatan volume

perdagangan dan arus investasi, serta memperluas cakupan kolaborasi strategis antara kedua negara dalam berbagai sektor pembangunan<sup>32</sup>.

Dampak ekonomi IK-CEPA harus diperhitungkan bukan hanya sekedar indikator makro ekonomi tetapi perlu dilihat bagaimana dampak IK-CEPA ini memberi keuntungan pada Investasi, Akses Pasar Barang dan Jasa, dan kerjasama ekonomi untuk Indonesia dan Korea Selatan.

#### 4.1.1.1 Investasi

Kemudahan regulasi dan perlindungan investor asing mendorong sektor investasi untuk berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia memberi Korea Selatan banyak peluang untuk investasi terutama di bidang strategis seperti manufaktur, infrastruktur, energi terbarukan dan teknologi informasi. Pada tahun 2020 hingga 2023 terdapat pendapatan yang dialami oleh kedua negara.



Gambar 4.1 Grafik Investasi Korea Selatan Ke Indonesia tahun 2020-2024

Sumber Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia dan BPS RI Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, aliran investasi dari Korea Selatan ke Indonesia pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan secara bertahap, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun awal periode pengamatan.

Pada tahun 2020, nilai investasi Korea Selatan yang masuk ke Indonesia berada pada kisaran **1.841. juta USD**. Namun demikian, pada tahun 2021, terjadi

<sup>32</sup> Vanda Kartasasmita, "Indonesia-Korea Comprehensive Economic partnership Agreement", UMKMINDONESIA.ID, 17 September 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-ik-cepa>, diakses 12 Juni 2025

penurunan investasi menjadi sekitar **1.640 juta USD**, atau mengalami kontraksi kurang lebih **10,5%** dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas investasi lintas negara. Memasuki tahun 2022, arus investasi mulai menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Nilai investasi meningkat menjadi **sekitar 2.297 juta USD**, mencerminkan adanya peningkatan sekitar **35%** dibandingkan tahun 2021. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai **2.543 juta USD**, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar **2.987 juta USD**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam minat investor Korea Selatan terhadap Indonesia selama periode tersebut.

Salah satu pendorong utama meningkatnya investasi Korea Selatan ke Indonesia selama periode 2020-2024 adalah sektor industri dan manufaktur. Dalam sektor ini perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO menjalin kemitraan strategis dengan PT Krakatau Steel dalam pengembangan dan ekspansi industri baja nasional yang berlokasi di Cilegon. Kerjasama tersebut berkontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung agenda hilirisasi industri logam di Indonesia.

Selanjutnya, sektor kendaraan listrik menjadi fokus kerjasama bilateral yang semakin menonjol. *Hyundai Motor Group* telah membangun fasilitas produksi mobil listrik di Bekasi dan turut mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Sejalan dengan itu, *LG Energy Solution* menggerakkan investasi berskala besar melalui kolaborasi dengan PT Aneka Tambang (Antam) dan *Indonesia Battery Corporation (IBC)* guna membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Investasi dari Korea Selatan juga meluas ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT) mencerminkan komitmen kedua negara terhadap transisi energi ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (*net-*

*zero emissions*) pada tahun 2060, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan<sup>33</sup>.

Di sektor teknologi dan elektronika, perusahaan multinasional seperti Samsung dan LG memperluas kapasitas produksinya di Indonesia baik dalam bentuk manufaktur perangkat elektronik maupun pengembangan pusat riset dan inovasi. Selain itu, perusahaan modal Ventura asal Korea Selatan, seperti *Kakao Ventures* dan *Naver*, mulai aktif berinvestasi pada startup teknologi di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang teknologi finansial (*fintech*), teknologi pendidikan (*edutech*), dan teknologi kesehatan (*healthtech*). Korea Selatan turut berperan dalam pengembangan kawasan industri strategis, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru dan destinasi utama relokasi industri global<sup>34</sup>.

Secara umum, investasi Korea Selatan ke Indonesia selama periode tersebut mencerminkan hubungan ekonomi yang semakin intensif dan saling menguntungkan. Investasi yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga berorientasi strategis dan jangka panjang, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dan transformasi industri nasional.

Peningkatan investasi ini tidak terlepas dari penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama setelah diberlakukannya **Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA)**. Perjanjian tersebut memberikan dasar hukum serta berbagai insentif yang mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal asing, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, teknologi informasi, dan energi terbarukan. Secara keseluruhan, grafik tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi dari pihak investor Korea Selatan terhadap iklim investasi Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi luar negeri yang

---

<sup>33</sup> Redaksi, "Ini Strategi Pemerintah Muluskan Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbon Netral", ESDM RI, 17 februari 2022, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/ini-strategi-pemerintah-muluskan-peta-jalan-transisi-energi-menuju-karbon-netral>.

<sup>34</sup> KBS WORLD IND, "Perusahaan Teknologi Informatika Korea Selatan Bersaing Rintis Pasar Global" KBS WORLD Indonesia, 18 April 2022, [https://world.kbs.co.kr/service/news\\_vod\\_view.htm?lang=i&menu\\_cate=Po&id=&Seq\\_Code=66514](https://world.kbs.co.kr/service/news_vod_view.htm?lang=i&menu_cate=Po&id=&Seq_Code=66514).

adaptif dan progresif berperan penting dalam mendorong peningkatan investasi asing langsung (foreign direct investment) yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.

#### **4.1.1.2 Akses Pasar Barang dan Jasa**

Perjanjian IK-CEPA menghadirkan kerangka liberalisasi perdagangan yang diformulasikan untuk mereduksi berbagai hambatan tarif maupun non-tarif, dengan tujuan memperlancar mobilitas barang dan jasa di antara Indonesia dan Korea Selatan. Dari sisi kuantitatif, implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri manufaktur bernilai tambah rendah hingga menengah. Akses pasar yang diberikan Indonesia lebih besar produk (Komoditas Pertanian, dan Komponen Manufaktur Ringan). Sedangkan dari Korea memberikan kesempatan ekspor mesin, kendaraan, dan komponen elektronik.

#### **4.4.1.3 Kerjasama Ekonomi**

Untuk memperluas cakupan kerja sama ekonomi bilateral dengan memasukkan sektor-sektor penting seperti transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, energi terbarukan, serta penelitian dan inovasi teknologi. Kerja sama ini disusun dalam kerangka kerja normatif yang bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang modern dan berwawasan lingkungan.

Setelah diimplementasikan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea selatan melalui Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terdapat beberapa kesepakatan kerja sama yang sudah terjalin di bidang Ekonomi dan perdagangan, MoU Ekosistem Kendaraan Listrik, Dukungan Investasi Korporasi, Promosi UMKM dan Energi Hijau, Politik dan Keamanan, dan Diplomasi Tingkat Tinggi dan Strategi Indo-Pasifik.

#### **4.1.2 Dampak Politik**

Secara politik, perjanjian ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Marxisme menilai bahwa kerja sama antarnegara bukanlah hubungan yang setara, melainkan cermin dari distribusi kekuatan ekonomi global. Dalam kerangka ini, IK-CEPA tidak hanya menjadi alat ekspansi pasar Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara-negara maju dapat mendikte arah kebijakan ekonomi negara berkembang melalui instrumen perdagangan. Hal ini memperkuat tesis Gilpin bahwa struktur politik internasional senantiasa dibentuk oleh dinamika ekonomi yang dikendalikan oleh kelas kapitalis global.

#### **4.4.2.1 Peningkatan Hubungan Diplomatik**

Implementasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) memengaruhi banyak hal, bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik kedua negara. Perjanjian ini meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara tidak hanya meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga mendorong kerja sama politik di luar negeri untuk menangani masalah global seperti keamanan kawasan Indo-Pasifik, perubahan iklim, dan transformasi digital. IK-CEPA menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi dapat meningkatkan posisi diplomatik dan kepercayaan politik negara mitra.

IK-CEPA memiliki tujuan untuk membangun pola rantai akses yang mencakup akses pasar, pengembangan kapasitas, serta memfasilitasi perdagangan dan investasi melalui kolaborasi ekonomi. Signifikansi IK-CEPA dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan dan menstabilkan volume perdagangan antara kedua negara. Sebelum adanya kesepakatan yang terjalin antara kedua yaitu Indonesia dan Korea Selatan terjadi proses yang sangat panjang dalam perundingan IK-CEPA untuk kedua negara.

IK-CEPA memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan besar bagi Indonesia karena kondisi ekonomi Indonesia dan Korea Selatan berbeda. Secara keseluruhan, situasi ekonomi yang sedang berkembang dapat menjadi peluang yang

sangat menguntungkan bagi Indonesia. Jika dibandingkan dengan Indonesia sebagai negara berkembang dengan investasi, modal, dan sumber daya teknologi canggih, Korea Selatan adalah negara maju. Namun, karena potensi pasar domestik yang besar, kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 6% setiap tahunnya, Indonesia menjadi salah satu tempat terbaik untuk investasi.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2011, implementasi IK-CEPA sebagai mitra dagang utama yang paling dinamis bagi Indonesia, Korea Selatan telah memberikan kontribusi positif dengan menunjukkan peningkatan perdagangan. antara Januari dan Maret, atau kuartal pertama tahun 2025, ekspor Indonesia ke Korea Selatan mencapai US\$ 2,57 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Korea Selatan mencapai US\$ 2,11 miliar. Akibatnya, pada kuartal I-2025, Indonesia mencatatkan surplus dengan Korea Selatan sebesar US\$ 457,30 juta, peningkatan 77,38% dari periode yang sama pada 2024 sebesar US\$ 257,80 juta<sup>35</sup>.

Sementara perjanjian dagang antar negara lainnya tidak seluas IK-CEPA. Perjanjian ini mencakup perdagangan barang, jasa, dan investasi serta kerjasama ekonomi yang lebih luas, misalnya bantuan ekonomi, kerja sama teknologi, energi terbarukan, dll<sup>36</sup>. Untuk kerjasama politik internasional antara Indonesia dan Korea Selatan makin erat dengan adanya IK-CEPA yang bukan hanya tentang perdagangan barang, jasa, dan investasi saja tetapi politik yang semakin terjalin semenjak di implementasinya kerjasama bilateral antar kedua negara.

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara yang memiliki posisi geopolitik strategis di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yang secara konsisten membangun serta memperluas jalinan kerja sama politik internasional.

---

<sup>35</sup> Vatrisha Putri Nur, "Indonesia Catat Surplus Perdagangan dengan Korsel US\$ 457,3 Juta pada Kuartal I-2025", KONTAN.CO.ID, <https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-catat-surplus-perdagangan-dengan-korsel-us-4573-juta-pada-kuartal-i-2025> diakses 13 Juni 2025

<sup>36</sup> ALGA VANAYA PUSPITA, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INDONESIA MENANDATANGANI INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA) PADA TAHUN 2020", <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/30510>

Kolaborasi antara kedua negara tidak hanya terbatas pada hubungan diplomatik formal, melainkan juga mencakup sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan, penguatan sistem hukum, transformasi pemerintahan digital, serta keterlibatan aktif dalam forum multilateral regional dan global. Dalam konteks implementasi IK-CEPA, dimensi politik dari hubungan bilateral ini mengalami penguatan signifikan, mencerminkan arah kebijakan luar negeri yang bersifat holistik, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga bersifat strategis dalam memperkuat stabilitas dan tatanan politik kawasan.

Pada hari Senin, 21 Februari, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, menerima kunjungan resmi Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MoTIE) Korea Selatan, Moon Sung Wook, di kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja Menteri Moon ke Indonesia, dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu penting, antara lain kerja sama perdagangan, investasi, serta peran Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022.

*“Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang strategis utama Indonesia baik secara bilateral maupun regional. Untuk itu, saya menyambut baik kunjungan Menteri Moon dan berharap kedua negara dapat saling mendorong pemulihan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan yang sejalan dengan tema utama Presidensi G20 Indonesia 2022 yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’,”* ungkap Mendag Lutfi.

Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa fokus utama dalam pertemuan bilateral kedua menteri adalah pembahasan berbagai isu terkait kerja sama perdagangan, baik dalam konteks bilateral maupun regional, khususnya mengenai penyelesaian proses ratifikasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang ditargetkan rampung pada Maret 2022.

*“Terkait proses ratifikasi IK-CEPA dan persetujuan RCEP, saat ini Indonesia telah berada di tahap akhir proses ratifikasi. Kami optimis proses ini dapat segera diselesaikan pada Maret 2022 sehingga dapat segera*

*diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan,”* ujar Mendag Lutfi.

Menteri Perdagangan Lutfi turut menyampaikan apresiasi kepada Korea Selatan atas dimulainya implementasi perjanjian RCEP di negara tersebut sejak tanggal 1 Februari 2022. *“Kami berharap implementasi IK-CEPA dan persetujuan RCEP akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, Korea Selatan, dan dunia,”* tambahnya

Menteri Perdagangan Lutfi menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung proses pemulihan ekonomi global yang resilien dan berkelanjutan. *“Indonesia juga mendorong Korea Selatan untuk semakin aktif berinvestasi di Indonesia. Kami menyambut baik usulan Korea Selatan untuk mendorong kerja sama rantai suplai (supply chain) untuk produk-produk tertentu,”* imbuh Mendag Lutfi.

Selain membahas kerja sama ekonomi, pertemuan tersebut juga menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi prioritas dalam rangkaian agenda Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Fokus utama diskusi mencakup agenda *Trade, Investment and Industry Working Group* (TIIWG), yang dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengembangan kebijakan perdagangan kedua negara, serta perluasan kerja sama di bidang investasi. Dalam konteks ini, Menteri Perdagangan Lutfi mengajukan permintaan dukungan kepada Pemerintah Korea Selatan terkait pelaksanaan TIIWG, khususnya dalam mendorong dimasukkannya isu industri sebagai bagian dari kelompok kerja tersebut.

Sementara itu, Menteri Moon menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis bagi Korea Selatan, terutama dalam kerangka kebijakan *New Southern Policy* yang telah diinisiasi oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

*“Hubungan bilateral kedua negara terus bergerak ke arah positif di berbagai bidang, terutama perdagangan dan investasi. Saya yakin hal ini dapat semakin ditingkatkan dengan komitmen kedua negara dalam mendorong implementasi IK-CEPA dan persetujuan RCEP. Saya juga sangat mengapresiasi kerja sama kedua negara yang sangat erat dalam mengatasi permasalahan rantai*

*pasok global dan mewujudkan perdagangan digital yang lebih baik,”* ungkap Menteri Moon.

Dalam forum pertemuan tersebut, Pemerintah Korea Selatan secara khusus menyampaikan permohonan dukungan dari Indonesia terkait pencalonan Kota Busan sebagai tuan rumah *World Expo 2030*. Kunjungan Menteri Moon ke Indonesia juga bertujuan untuk memimpin Delegasi Korea Selatan dalam forum *1st Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC)* Indonesia-Korea yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa, 22 Februari. Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data tahun 2021, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan mencapai USD 18,41 miliar. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Korea Selatan meliputi batu bara, bijih tembaga, antena digital untuk televisi, minyak kelapa sawit, serta asam lemak monokarboksilat yang digunakan dalam industri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 13,36 miliar. Pada tahun 2021, Korea Selatan menempati peringkat ketujuh sebagai sumber investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) di Indonesia, dengan nilai realisasi investasi mencapai USD 1,64 miliar yang mencakup sebanyak 2.511 proyek<sup>37</sup>.

Beberapa kerjasama politik Internasional yang telah terjalin antara kedua negara yaitu, Indonesia dan Korea Selatan Tandatangani pakta untuk meningkatkan kerjasama hukum pada tanggal 6 Februari 2025, Sejeong dengan agenda *Indonesia and South Korea have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance collaboration in legal information systems and legislative exchange*. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Supratman Andi Agtas dan Menteri Perundang-undangan Pemerintah Korea Selatan Lee Wan-Kyu. kemitraan ini berfokus pada pertukaran informasi hukum langsung, pengembangan sistem informasi hukum yang lebih canggih, dan inisiatif pengembangan kapasitas.

---

<sup>37</sup> Tim Redaksi, “Mendag RI Terima Kunjungan MoTIE Korea Selatan Bahas Isu Perdagangan Bilateral dan Regional”, KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI, 21 Februari 2022, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/mendag-ri-terima-kunjungan-motie-korea-selatan-bahas-isu-perdagangan-bilateral-dan-regional>, 26 Juni 2025.

Selain itu, kemitraan ini mencakup konferensi internasional dan inisiatif pengembangan kapasitas. Menteri Supratman menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi hukum Korea Selatan untuk memperkuat kerangka hukum Indonesia.

*“Kerja sama ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi kita, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan hukum Indonesia,” ujarnya, seperti di [antaranews.com](https://antaranews.com).*

Perjanjian ini berlaku selama lima tahun kedepan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan bilateral yang telah terjalin sebelumnya, yang mencakup inisiatif penelitian bersama serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Melalui kerja sama ini, kedua negara berkomitmen untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap dinamika global, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan<sup>38</sup>.

Pada tanggal 1 juni 2024, Singapura Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia telah menerima sumbangan kapal selam dari Korea Selatan berupa kapal Korvet Bucheon 773 berusia 36 tahun dengan memiliki panjang 88,3 meter yang dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, Meskipun Komite Pertahanan menyuarakan kekhawatiran atas biaya perawatan kapal tua yang mencapai 85 juta dolar AS.

*“Idealnya kita membeli yang baru tapi itu akan memakan waktu lama Ini lebih baik daripada kita tidak punya apa-apa sama sekali,” katanya, seraya menambahkan kapal itu bisa digunakan untuk 10-15 tahun ke depan dan model baru akan membutuhkan biaya \$300 juta hingga \$500 juta. Ujar Wakil Menteri Pertahanan Herindra kepada DPR.*

pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari modernisasi militer. Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto, telah menginvestasikan miliaran dolar untuk memperbarui sistem pertahanan, termasuk pengadaan jet tempur dan kapal selam.

---

<sup>38</sup> Admin, "Indonesia, South Korea Sign Pact To Boost Legal Cooperation", diakses 13 Juni 2025 <https://bidtik.kepri.polri.go.id/indonesia-south-korea-sign-pact-to-boost-legal-cooperation/>, 2025

Namun, keputusan Prabowo untuk membeli perangkat keras bekas yang dimiliki oleh Qatar tetapi menuai banyak penolakan karena jet-jet tersebut sudah terlalu tua untuk digunakan oleh Indonesia. Rendahnya belanja pertahanan Indonesia dibandingkan PDB menjadikannya tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan. Mayoritas anggota komisi parlemen yang membidangi urusan pertahanan menyatakan keraguan terhadap efektivitas hibah tersebut bagi kepentingan nasional. Hibah ini diberikan setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan terkait penyelesaian sengketa pendanaan proyek jet tempur bersama KF-21, yang memiliki nilai investasi sedikitnya 6 miliar dolar AS<sup>39</sup>.

Pada Kamis, 24 September, Kantor Wakil Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di lingkungan Sekretariat Kabinet menyelenggarakan seminar virtual mengenai kerja sama legislatif antara Indonesia dan Korea Selatan tahun 2020. Kegiatan ini merupakan implementasi dari rencana aksi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea dalam dokumen

*“Dokumen Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Kementerian Peraturan Perundang-undangan Republik Korea ditandatangani pada tanggal 10 September 2018 di Seoul, Korea Selatan,” kata Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet Fadlansyah Lubis ujarnya di [setkab.go.id](http://setkab.go.id).*

Pertama, penandatanganan Rencana Aksi Pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Legislasi Pemerintah Republik Korea untuk Periode Tahun 2020-2021, dan Kedua, sesi tanya jawab terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di kedua negara.

---

<sup>39</sup> Redaksi, “Indonesia accepts South Korea warship donation, despite cost concerns”, Reuters 6 Juni 2024, <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-accepts-south-korea-warship-donation-despite-cost-concerns-2024-06-06/>, 6 Juni 2024, diakses 18 Juni 2025

Dalam penandatanganan Rencana Aksi 2020–2021, kedua negara menyepakati kerja sama dalam mendukung pelaksanaan reformasi legislatif di Indonesia melalui berbagai program, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan sistem informasi legislatif. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk saling bertukar informasi terkait proses legislasi di masing-masing negara, serta mendiskusikan isu-isu relevan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama yang mendukung penyusunan undang-undang dan peraturan, khususnya dalam kerangka reformasi hukum di Indonesia dan praktik legislasi di Republik Korea<sup>40</sup>.



*Gambar 4.2 Kunjungan Indonesia ke Korea Selatan  
(sumber dari akun Twitter Presiden Moon Jae-in)*

Pada tanggal 8-11 September 2019 Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan Korea Selatan, Jokowi didampingi oleh ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam kunjungan tersebut. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan lawatan Presiden Korsel Moon Jae-In ke Indonesia pada November 2017. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara membahas sejumlah agenda kerja sama strategis, yang meliputi isu lingkungan, budaya, hingga kerja sama diplomatik dan simbolik yang mempererat hubungan kedua negara.

- Pengakuan Sebagai Warga Kehormatan Kota Seoul

Presiden Joko Widodo secara simbolik merupakan warga kehormatan Kota Seoul sejak tahun 2017. Dalam kunjungannya ke Sungai Cheonggyecheon, Presiden Jokowi tidak meminta fasilitas istimewa, melainkan hanya satu hal: ia ingin mengetahui rahasia Pemerintah Seoul dalam merevitalisasi sungai kota hingga

---

<sup>40</sup>Redaksi, Cabinet Secretariat Holds 2020 Indonesia-Korea Legislative Cooperation Seminar, <https://setkab.go.id/en/cabinet-secretariat-holds-2020-indonesia-korea-legislative-cooperation-seminar/>, diakses 18 Juni 2025, 27 September 2020

menjadi bersih dan indah. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Seoul saat itu, Park Won-soon, menyatakan kesiapannya membantu penanganan sungai di Jakarta sebagai bentuk implementasi dari hubungan sister city antara Jakarta dan Seoul.

*"Jakarta dan Seoul adalah sister city, apa pun yang Bapak perlukan kami siap karena Bapak (Presiden Jokowi) warga kehormatan Seoul," ujar Park Wo-soon.*

- Aspirasi Jokowi Retorasi Sungai Ciliwung

Restorasi Sungai Cheonggyecheon sendiri merupakan proyek besar yang dimulai pada tahun 2003 oleh Wali Kota Seoul Lee Myung-bak. Dengan anggaran sekitar USD 384 juta, proyek ini sempat menuai kritik keras dari masyarakat. Namun, setelah resmi dibuka kembali pada tahun 2005, sungai tersebut justru menjadi ikon kebersihan kota Seoul sekaligus destinasi wisata internasional. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi Presiden Jokowi dalam menangani permasalahan sungai di Jakarta. Setelah menyusuri Sungai Cheonggyecheon, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya untuk merevitalisasi Sungai Ciliwung dengan model serupa. Ia menilai bahwa restorasi seperti yang dilakukan di Seoul juga dapat diterapkan di Jakarta selama ada kemauan politik yang kuat.

*"Sebuah inspirasi yang sangat bagus, kalau di Jakarta ada Ciliwung bisa jadi bersih seperti ini, wow, dan itu bisa,". "Ini hanya 2,3 tahun, zaman Wali Kota Lee Myung-bak sungai bersih seperti ini, sehingga wali kotanya jadi presiden, "Saya kira sebuah tontonan yang bisa menjadi tuntutan kita bisa mengerjakan menggarap sungai yang ada di Jakarta. Kalau kita mau bisa," tegasnya Jokowi".*

- Pertemuan Budaya: Goyang Dayung dan Super Junior (Suju)

Dalam agenda lawatannya pada Senin (10/9), Presiden Jokowi juga bertemu dengan anggota boyband Korea Selatan, Super Junior (Suju), di Lotte Hotel, Seoul. Momen santai dan penuh keakraban tersebut memperlihatkan Jokowi menari goyang dayung bersama anggota Suju, seperti Yesung, Donghae, dan Eunhyuk. Pertemuan itu diunggah langsung oleh Yesung melalui akun Instagram pribadinya, @yesung1106. Video tersebut menunjukkan mereka menari dan tertawa bersama,

yang kemudian viral di kalangan warganet Indonesia. Gerakan “goyang dayung” sendiri sebelumnya sempat ditampilkan dalam koreografi Suju saat tampil di penutupan Asian Games 2018. Selain menari bersama, Suju juga memberikan album terbaru mereka bertajuk *Replay*, yang telah ditandatangani seluruh anggota, sebagai hadiah kenang-kenangan untuk Presiden Jokowi.

- Pernyataan Presiden Moon Jae-in dalam Bahasa Indonesia

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, memberikan kesan mendalam atas kunjungan Presiden Jokowi. Ia mengungkapkan perasaannya dalam bahasa Indonesia melalui akun Twitter resminya:

*“Hari ini Bapak Presiden Jokowi dan Ibu negara RI pulang ke Indonesia dengan penuh hasil dari kunjungan kenegaraan ke Korea. Saya merasa persahabatan antara kami menjadi lebih dalam seperti malam hari yang indah pada musim gugur Korea,” tulis Moon pada Selasa (11/9).*

Moon juga mengunggah sejumlah foto kenangan bersama Presiden Jokowi, termasuk momen penyambutan resmi di Istana Changdeok. Ia berharap kenangan tersebut memberikan kesan positif dan memperkuat kerja sama bilateral yang saling menguntungkan di masa depan. Moon menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan Korea Selatan dan Indonesia dalam konteks kerja sama jangka panjang yang berorientasi pada perdamaian dan kesejahteraan bersama.

- Sambutan Resmi di Istana Changdeok: Simbol Kehormatan

Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang disambut secara resmi di Istana Changdeok oleh Presiden Korea Selatan. Biasanya, upacara kenegaraan dilakukan di Istana Kepresidenan Blue House. Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, perubahan lokasi ini merupakan bentuk penghormatan khusus kepada Presiden Jokowi.

*“Hal ini menunjukkan bahwa kami sangat menghormati Presiden Jokowi,” ujar Kim Chang-beom.*

Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut oleh Presiden Moon Jae-in dan Ibu Negara Kim Jung-sook, serta anak-anak dari kedua negara yang mengibarkan bendera nasional masing-masing. Setelah itu, dilakukan prosesi upacara kenegaraan, yang dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Korea Selatan, diikuti dengan inspeksi pasukan kehormatan oleh kedua kepala negara<sup>41</sup>.



Gambar 4.3 Kunjungan Presiden Yoon Suk Yeol beserta Ibu Negara Kim Keon Hee dan Choi Si-Won  
(Sumber dari [KOREA.net](https://www.korea.net))

Pada tanggal 5 September 2023, Presiden Republik Korea, Yoon Suk Yeol, beserta Ibu Negara Kim Keon Hee, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, keduanya disambut secara resmi dengan pertunjukan tarian tradisional Indonesia. Momen ini menjadi lebih bermakna karena kunjungan tersebut juga bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Republik Korea dan Republik Indonesia.

Melalui keterangan resmi yang disampaikan dalam unggahan media sosial Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistiyanto, menyampaikan bahwa:

*“Sore ini (05/09/2023), saya dan Menteri ESDM RI, Bapak Arifin Tasrif menjemput Presiden Korea Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Presiden Yoon datang ke Indonesia untuk menghadiri KTT*

<sup>41</sup> Redaksi, 5 Fakta Tentang Kunjungan Jokowi ke Korea Selatan, KumparanNEWS.com, <https://kumparan.com/kumparannews/5-fakta-menarik-tentang-kunjungan-jokowi-ke-korea-selatan-1536704868644374725>, 12 September 2018, diakses 21 Juni 2025

*ASEAN dan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.”*

Dalam kesempatan terpisah, penulis memperoleh informasi langsung dari Dubes Gandhi mengenai agenda Presiden Yoon selama di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan terus mendampingi Presiden Yoon dalam seluruh rangkaian kunjungan kenegaraan sejak tanggal 5 hingga 8 September 2023. Selama berada di Jakarta, Presiden Yoon dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur yang membahas berbagai isu strategis regional, termasuk keamanan kawasan. Di samping itu, pertemuan bilateral antara Presiden Yoon dan Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2023 di Istana Negara. Mengutip laman resmi Korea.net, kedua kepala negara akan menandatangani dokumen-dokumen penting terkait kerja sama bilateral, dan selanjutnya menggelar konferensi pers bersama untuk mengumumkan hasil kesepakatan kepada publik.

Kunjungan Presiden Yoon ini juga bertepatan dengan kehadiran publik figur Korea Selatan, Choi Siwon, di Jakarta. Siwon hadir sebagai **Duta Promosi Korea** dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan persahabatan antara Republik Korea dan Republik Indonesia. Ia sebelumnya turut hadir dalam Resepsi Diplomatik KBRI Seoul yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2023, dalam rangka memperingati 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral. Dalam kapasitasnya sebagai **UNICEF East Asia & Pacific Regional Ambassador**, Siwon diundang sebagai tamu kehormatan dalam forum **ASEAN Business and Investment Summit 2023 (ABIS 2023)**. Dalam video singkat yang ditayangkan melalui akun resmi Instagram KBRI Seoul, Siwon menyampaikan ajakan reflektif:

*“Sekarang adalah waktunya untuk bukan hanya berpikir, melainkan mengambil tindakan.”*

Pernyataan tersebut diperkuat dalam pidato resminya di ABIS 2023, di mana ia mengemukakan pentingnya investasi untuk generasi muda:

*“Anak-anak adalah masa depan kita. Hanya Anda serta tindakan berarti Anda yang dapat mengubah dunia karena kita adalah pembuat perubahan.”*

Melalui pernyataannya, Siwon mengajak para pemimpin negara ASEAN dan mitra dialog untuk lebih serius dalam berinvestasi pada anak-anak, karena menurutnya hal tersebut memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan prospek ekonomi jangka panjang di kawasan Asia Tenggara<sup>42</sup>.



**Gambar 4.4 Kunjungan Ketua Parlemen Republik Korea Selatan, Kim Jin Pyo**

*(Sumber dari Kedutaan Besar Republik Korea Untuk Republik Indonesia)*

Pada tanggal 20 November 2023, Ketua Parlemen Republik Korea, Kim Jin Pyo, melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, ia bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka dan Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks parlemen. Selain itu, ia juga hadir dalam *The 9th MIKTA Speakers' Consultation* yang berlangsung di Jakarta. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi, Ketua Kim menyampaikan harapannya agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan-perusahaan Korea yang telah berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam sektor kendaraan listrik (EV), baja, dan petrokimia.

*“Perusahaan Korea memperluas investasi ke Indonesia sebagai basis produksi di bidang seperti EV, baja, dan petrokimia,” ujar Kim. “Saya mendengar bahwa presiden baru-baru ini bertemu dengan perusahaan Korea untuk*

---

<sup>42</sup> Monthi Rosselini IND, “Kehadiran Presiden Yoon Suk Yeol dan Choi Siwon pada KTT ASEAN 2023 di Jakarta”, KOREA.net, 06 September 2023  
<https://indonesian.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=238171#:~:text=Pada%205%20September%202023%2C%20Presiden%20Yoon%20Suk%20Yeol,Tinggi%20%28KTT%29%20ke-43%20Perhimpunan%20Bangsa-Bangsa%20Asia%20Tenggara%20%28ASEAN%29.diakses%2022%20Juni%202025,06%20September%202023>

*mendengarkan kesulitan mereka dan berharap agar ada penyelesaian masalah.” Ia juga menambahkan: “Namun, karena kekhawatiran perusahaan Korea mengenai reformasi pajak dan pembatasan impor masih ada, saya harap hal tersebut dapat menjadi perhatian dan mendapat dukungan sehingga dapat diselesaikan.”*

Dalam pertemuannya dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Kim Jin Pyo mengangkat beberapa isu penting, termasuk permintaan dukungan dari parlemen Indonesia terhadap pencalonan Kota Busan sebagai tuan rumah **World Expo 2030**. Selain itu, ia juga menyampaikan keprihatinan atas kendala yang masih dihadapi oleh perusahaan Korea di Indonesia, terutama yang terkait dengan kerja sama pertahanan, termasuk penyelesaian persoalan pembayaran proyek bilateral. Ketua DPR RI merespons positif hal tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia dalam memperluas hubungan bilateral, khususnya dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pariwisata, dan industri pertahanan Puan menyatakan bahwa Indonesia akan terus berupaya memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis antara kedua negara.

Agenda selanjutnya dalam kunjungan Ketua Kim adalah partisipasinya dalam forum **MIKTA Speakers’ Consultation ke-9** yang mengangkat tema *"Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenges."* Dalam forum tersebut, Kim Jin Pyo menyampaikan pidato resmi yang menekankan pentingnya solidaritas lintas negara untuk menjawab tantangan global jangka panjang. Forum ini juga dihadiri oleh para pimpinan parlemen dari negara-negara anggota MIKTA, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPR Turki Numan Kurtulmus, Wakil Ketua Senat Australia Andrew McLachlan, serta perwakilan parlemen Meksiko yang diwakili oleh Sekretaris Parlemen Fuesanta Guerrero Esquivel. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat peran parlemen dalam kerja sama multilateral dan pembangunan global berkelanjutan<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Redaksi, “Kunjungan Resmi Ketua Parlemen Kim Jin Pyo Ke Indonesia”, [https://overseas.mofa.go.kr/id-id/brd/m\\_2706/view.do?seq=756289](https://overseas.mofa.go.kr/id-id/brd/m_2706/view.do?seq=756289), 22 Juni 2025, 22 November 2023.

#### 4.1.2.2 Kerjasama Bilateral New Southern Policy Korea Selatan

Kebijakan luar negeri Korea Selatan yang dikenal dengan New Southern Policy (NSP), yang digagas di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, merupakan strategi diplomatik yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Melalui kebijakan ini, Korea Selatan secara proaktif membangun dan memperluas jaringan kerja sama strategis dengan negara-negara di kawasan selatan, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan India. Strategi ini didasari oleh pertimbangan bahwa kawasan ASEAN memiliki peran sentral dalam dinamika pertumbuhan ekonomi, politik, dan budaya di tingkat regional, sehingga menjadi mitra potensial dalam memperluas jangkauan diplomasi dan diversifikasi ekonomi Korea Selatan.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, disertai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, telah mendorong Korea Selatan untuk mengalihkan fokus ekonominya ke pasar-pasar alternatif di kawasan Asia Tenggara, termasuk negara-negara ASEAN. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi strategis sebagai mitra utama bagi Korea Selatan. Pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam pelaksanaan *New Southern Policy*, sebagaimana tercermin dalam nilai investasi Korea Selatan di Indonesia yang mencapai USD 8,5 miliar. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi asing terpenting bagi Korea Selatan, berada di peringkat kedua setelah Vietnam di antara delapan negara anggota ASEAN (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Kunjungan luar negeri pertama Presiden Moon Jae-in ke Indonesia pada November 2017 menjadi momentum awal dalam implementasi *New Southern Policy*. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis khusus. Kemitraan ini mencakup empat bidang utama, yakni kerja sama di sektor pertahanan dan diplomasi, peningkatan perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, serta kolaborasi dalam isu-isu regional dan global. Status kemitraan strategis ini

dibangun atas dasar kesamaan nilai fundamental seperti demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen terhadap sistem pasar terbuka. Di samping itu, kedua negara juga menekankan pentingnya prinsip saling mendukung sebagai landasan utama dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan<sup>44</sup>.

Kebijakan *New Southern Policy* (NSP) yang diinisiasi oleh Korea Selatan memberikan sejumlah manfaat strategis bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas dan memperdalam kerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, dan diplomasi. Implementasi NSP secara langsung berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, yang tercermin dari peningkatan intensitas kerja sama perdagangan, investasi, serta pembangunan kapasitas Indonesia dalam aspek diplomasi pertahanan. Salah satu kontribusi utama NSP adalah peran aktif Korea Selatan dalam memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia berperan sebagai aktor independen yang memfasilitasi kemitraan ASEAN-Korea Selatan secara konstruktif. Konsekuensinya, posisi Indonesia dalam dinamika kawasan menjadi semakin strategis.

NSP telah membawa dampak positif dalam hubungan ekonomi bilateral. Indonesia dan Korea Selatan secara aktif menjalin kolaborasi dalam upaya meningkatkan volume perdagangan dan memperluas peluang investasi di berbagai sektor. NSP juga membuka ruang kerja sama di bidang teknologi, di mana Korea Selatan mendukung transfer teknologi dan inovasi ke Indonesia melalui kerja sama riset, pertukaran ilmu pengetahuan, serta pelatihan teknis. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknologi dan meningkatkan daya saing industri nasional Indonesia. Selain sektor ekonomi dan teknologi, NSP turut berkontribusi

---

<sup>44</sup> Andriani Pujayanti, "Potensi dan Tantangan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan", Bidang Hubungan Internasional Info Singkat Kajina Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XI, No.23/I/Puslit/Desember/2019, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-179.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-179.pdf), diakses 18 Juni 2025

dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui berbagai program kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, NSP telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Korea Selatan melalui NSP bersifat inklusif dan holistik.

Di tingkat regional, kontribusi NSP juga berdampak luas. Penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara secara lebih merata. Salah satu kontribusi konkret NSP terlihat melalui keterlibatan Korea Selatan dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Proyek-proyek ini berperan penting dalam meningkatkan konektivitas nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain aspek ekonomi, NSP juga memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan kerjasama diplomatik antara kedua negara. Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan global dan regional melalui kolaborasi di berbagai forum internasional. Hal ini mencerminkan kedekatan hubungan bilateral yang tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tetapi juga pada kepentingan bersama di tingkat kawasan dan global<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm 4

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

kerja sama Indonesia–Korea melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat posisi ekonomi politik Indonesia di ranah internasional, khususnya dalam kurun waktu 2020 hingga 2023.

**Pertama**, dari aspek ekonomi, IK-CEPA telah memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Dengan dihapuskannya lebih dari 95% tarif bea masuk, produk-produk unggulan Indonesia seperti perikanan, tekstil, pertanian, dan otomotif memperoleh akses pasar yang lebih luas ke Korea Selatan. Selain itu, masuknya investasi asing langsung dari Korea Selatan, khususnya di sektor baja, petrokimia, kendaraan listrik, dan energi terbarukan, membuktikan bahwa IK-CEPA berhasil menarik minat investor sekaligus mendukung program hilirisasi industri nasional. **Kedua**, dari sisi politik internasional, IK-CEPA memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, sekaligus memperkokoh kerja sama dalam kerangka kebijakan New Southern Policy (NSP) Korea Selatan. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai mitra ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat stabilitas kawasan, memperluas kerjasama teknologi, serta memajukan agenda pembangunan berkelanjutan.

**Ketiga**, dari sisi politik internasional, IK-CEPA memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, sekaligus memperkokoh kerja sama dalam kerangka kebijakan New Southern Policy (NSP) Korea Selatan. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai mitra ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat stabilitas kawasan, memperluas kerjasama teknologi, serta memajukan agenda pembangunan berkelanjutan. Keempat, secara akademik, temuan dalam skripsi ini menegaskan relevansi pendekatan Ekonomi Politik Internasional yang dikemukakan oleh Robert Gilpin serta teori Kepentingan Nasional Hans Morgenthau. Hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam kerangka IK-CEPA menunjukkan bagaimana dinamika

kekuatan ekonomi dan politik antarnegara dapat digunakan sebagai sarana mencapai kepentingan nasional masing-masing pihak secara resiprokal.

Dengan demikian, IK-CEPA dapat disimpulkan bukan sekadar perjanjian dagang, melainkan bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur ekonomi-politik regional dan global.

## **5.2 Saran**

Terlihat bahwa kerja sama Indonesia–Korea dalam kerangka IK-CEPA merupakan model kemitraan strategis yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh dimensi politik internasional, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, agar hasil kerja sama ini memberikan manfaat optimal secara jangka panjang dan berkelanjutan, penulis mengajukan saran-saran berikut sebagai refleksi akhir:

Pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang serta memperkuat diplomasi ekonomi yang bersifat ofensif dan proaktif, bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi perancang arah kerja sama bilateral. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi/BKPM harus berperan sebagai simpul utama yang mengintegrasikan kebijakan perdagangan luar negeri dengan agenda pembangunan nasional. IK-CEPA harus diposisikan bukan sekadar sebagai perjanjian perdagangan, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi nasional menuju struktur industri bernilai tambah tinggi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama internasional seperti IK-CEPA tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap kepentingan nasional. Liberalisasi perdagangan dan investasi harus tetap dikendalikan dalam koridor kebijakan industri domestik dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, penguatan regulasi domestik, perlindungan pasar lokal yang sehat, serta keberpihakan pada UMKM dan ekonomi kerakyatan menjadi hal yang esensial.

Salah satu aspek penting dari IK-CEPA adalah potensi besar dalam alih teknologi dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan sektor swasta perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung

inovasi melalui pembentukan pusat riset bersama, insentif untuk joint venture industri, serta program beasiswa dan pelatihan teknis. Sektor pendidikan tinggi dan lembaga riset harus dilibatkan secara langsung dalam peta jalan kerja sama jangka panjang Indonesia–Korea. Kerja sama perdagangan dan investasi hanya akan efektif jika daerah sebagai penerima manfaat memiliki kesiapan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu diberikan kapasitas dan akses untuk memahami serta mengimplementasikan peluang yang tersedia dari IK-CEPA, termasuk melalui penyusunan kebijakan daerah yang selaras dengan agenda nasional dan internasional.

Indonesia membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi kerja sama internasional yang berbasis data, obyektif, dan transparan. Hal ini penting untuk mengetahui secara nyata apakah perjanjian seperti IK-CEPA benar-benar membawa keuntungan, atau justru menimbulkan ketimpangan baru. Evaluasi tersebut harus melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha sebagai pihak independen yang memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. Keberhasilan hubungan bilateral Indonesia–Korea dalam kerangka IK-CEPA dapat dijadikan model untuk mendorong kerja sama kawasan ASEAN–Korea secara lebih strategis dan inklusif. Indonesia sebagai pemimpin kawasan memiliki peran penting dalam menyuarkan kerja sama ekonomi-politik berbasis keadilan, ketahanan, dan pembangunan manusia di tingkat regional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ismail,, & Darynaufal Mulyaman. (2024, juni). “Pendekatan Behavioralisme dan Kendala Perundingan Indonesia-Korea Comperhensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), 15(2), 33-45. From [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63734575/Jurnal\\_ISIP\\_IISIP\\_Publis hed20200625-22579-1h5vgm-libre.pdf?1593108944=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPendekatan\\_Behavioralisme\\_dan\\_K endala\\_Pe.pdf&Expires=1746403986&Signature=FExZ7ZsX6Gam8W](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63734575/Jurnal_ISIP_IISIP_Publis hed20200625-22579-1h5vgm-libre.pdf?1593108944=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPendekatan_Behavioralisme_dan_K endala_Pe.pdf&Expires=1746403986&Signature=FExZ7ZsX6Gam8W)
- Andhira Prameswari Maharani. (2023). Implementasi Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership, Agreement (IK-CEPA) terhadap Perekonomian indonesia, Perjanjian Internasional. 2023. 11-12.
- Anto Purwanto. (2014). Potensi dan Peluang Implementasi Ik-Cepa terhadap Perluasan Akses Pasar Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia Di Pasar Korea Selatan. *Jurnal Syntax Adminiration*, 5(6), 6-7.
- Anto Purwanto. (2024). Dampak Implementasi IK-CEPA terhadap Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia-Korea Selatan, *Jurnal Review dan Pengajaran. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved Desember 22, 2024 from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/id>
- Cahya Puteri Abdi Rabbi,. (2021, Desember 8). *Implementasi IK-CEP, 11.687 Produk Ekspor RI Bebas Bea Masuk Korsel*. Retrieved Juni 12, 2025 from [katadata.co.id](https://katadata.co.id): <https://katadata.co.id/berita/industri/61b012e024f3c/implementasi-ik-cepa-11687-produk-ekspor-ri-bebas-bea-masuk-korsel>
- Database Peraturan. (n.d.). “Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)”. From Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228475/uu-no-25-tahun-2022>

Dr. Syamsul Hadi, S.E., M.M, Dr. Drs. Danang Sunyoto, S.H., S.E., M.M., C.B.L.D.M, Dr. Ambar Lukitaningsih, M.M, & Dr. Kusuma Chandra Kirana, M.M. A.K.A. Agustinus, S.Si., M.Sc. (2024). *STRATEGI MENYUSUN PETA POTENSI EKONOMI*. (Magister Alfatah Kalijaga, S.T., M.T., C.G.L., Ed.) EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021. From <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/568172-strategi-menyusun-peta-potensi-ekonomi-485a3ab1.pdf>

ekbangsetda. (2019, mei 27). *EKONOMI INDONESIA*. Retrieved desember 12, 2024 from Ekbangsetda: <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ekonomi-indonesia-29>

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INDONESIA MENANDATANGANI INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA) PADA TAHUN 2020. (2022, April 26).

FTA. (2022, Agustus 30). *Mendag Zulkifli Hasan Optimistis UU RCEP dan IK-CEPA Tingkatkan Ekspor Nasional*. Retrieved Desember 20, 2024 from Free Trade Agreement Center: <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ikcepa-tingkatkan-ekspor-nasional#:~:text=Sekilas%20IK%2DCEPA,daya%20manusia%20dan%20transfer%20teknologi>.

Gilpin, R., & Gilpin, J. M. (2001). *Global political economy : understanding the international economic order*. Princeton University Press.

IK-CEPA. (2023, January 2). Retrieved December 25, 2024 from FTA Center: <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa>

*Indonesia Catat Surplus Perdagangan dengan Korsel US\$ 457,3 Juta pada Kuartal I-2025*. (2025, May 19). Retrieved June 13, 2025 from industri kontan: <https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-catat-surplus-perdagangan-dengan-korsel-us-4573-juta-pada-kuartal-i-2025>

*Indonesia, South Korea Sign Pact To Boost Legal Cooperation*. (2025). Retrieved Juni 13, 2025 from [bidik.kepri.polri.go.id](http://bidik.kepri.polri.go.id):

[https://bidtik.kepri.polri.go.id/indonesia-south-korea-sign-pact-to-boost-legal-cooperation/?utm\\_source=chatgpt.com](https://bidtik.kepri.polri.go.id/indonesia-south-korea-sign-pact-to-boost-legal-cooperation/?utm_source=chatgpt.com)

*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK - CEPA)*. (2023, September 17). Retrieved June 12, 2025 from UKMINDONESIA.ID: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-ik-cepa>

*Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Kemitraan Strategis*. (2022, July 28). Retrieved Mei 12, 2025 from Sekretariat Negara: [https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia\\_korea\\_selatan\\_sepakat\\_tingkatkan\\_kemitraan\\_strategis](https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_korea_selatan_sepakat_tingkatkan_kemitraan_strategis)

*Kehadiran Presiden Yoon Suk Yeol dan Choi Siwon pada KTT ASEAN 2023 di Jakarta : Korea.net : Laman resmi pemerintah Republik Korea*. (2023, September 6). Retrieved Juni 22, 2025 from Korea.net: <https://indonesian.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=238171>

KEMENDAGRI. (2023, Januari 1). *IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Mendag Zulkifli Hasan: “Jalan Tol” Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas*. Retrieved Desember 24, 2023 from Laman Resmi KEMENDAGRI: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-mendag-zulkifli-hasan-jalan-tol-perdagangan-indonesia-korea-mulai-terbuka-luas>

KEMENKEU 2023. (2023, January 17). *IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea**IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea*. Retrieved December 25, 2024 from Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html>

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *Indonesia-Korea CEPA*. Retrieved april 29, 2023 from kemendag.go.id: <https://kadi.kemendag.go.id/perjanjian-dagang/ik-cepa>

- Komite Anti Dumping Indonesia. (2020). *Indonesia-Korea CEPA*. Retrieved Mei 12, 2025 from Kementrian Perdagangan Indonesia: <https://kadi.kemendag.go.id/perjanjian-dagang/ik-cepa>
- Muhammad Taqy Dwi. (2024). South Korea's Cooperation With Indonesia in the implementation of the New Southern Policy IK-CEPA in the Economic Sector. *Globalization And Foreign Affairs Journal*, *i*(2), 3-4.
- Nana Triharyanti dkk. (2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022". *Administrasi-Jurnal ilmu Administrasi dan Manajemen*, *7*(3), 7-8. From [https://www.researchgate.net/publication/377860554\\_Analisis\\_Kepentingan\\_Ekonomi\\_Politik\\_Indonesia\\_Terdapat\\_Reaktivasi\\_Perjanjian\\_IK-CEPA\\_Indonesia-Korea\\_Comprehensive\\_Economic\\_Partnership\\_Agreement\\_Tahun\\_2019-2022](https://www.researchgate.net/publication/377860554_Analisis_Kepentingan_Ekonomi_Politik_Indonesia_Terdapat_Reaktivasi_Perjanjian_IK-CEPA_Indonesia-Korea_Comprehensive_Economic_Partnership_Agreement_Tahun_2019-2022)
- Nuryana, & Dewita Harthanti. (2018). PENGARUH IMF (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN EKONOMI- POLITIK INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU (1967-1974). *3*, 21-29.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation Indonesia. (2023, Januari 3). *Indonesia, South Korea Officially Implement IK-CEPA - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved Mei 1, 2025 from Sekretariat Kabinet: <https://setkab.go.id/en/indonesia-south-korea-officially-implement-ik-cepa/>
- Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of*. (2022). From DATABASE PERATURAN: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228475/uu-no-25-tahun-2022>
- R. A. (2017, 1 24). Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IKCEPA. *Journal of Economics and Behavioral*

- Studies*, 8(6), 171-182. Retrieved 12 26, 2024 from [https://doi.org/10.22610/jeps.v8i6\(j\).1491](https://doi.org/10.22610/jeps.v8i6(j).1491)
- Rebeca Pratiwi Indonesia Rompas,. (2019). Hubungan Dagang Indonesia dan Korea Selatan 2011-2016. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1).
- Redaksi. (2018, September 12). *5 Fakta Tentang Kunjungan Jokowi ke Korea Selatan*.. Retrieved Juni 21, 2025 from KumparanNEWS.com: <https://kumparan.com/kumparannews/5-fakta-menarik-tentang-kunjungan-jokowi-ke-korea-selatan-1536704868644374725>
- Redaksi. (2020, September 27). *Cabinet Secretariat Holds 2020 Indonesia-Korea Legislative Cooperation Seminar*. Retrieved Juni 18, 2025 from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/en/cabinet-secretariat-holds-2020-indonesia-korea-legislative-cooperation-seminar/>
- Redaksi. (2023, September 22). *Kunjungan Resmi Ketua Parlemen Kim Jin Pyo Ke Indonesia*. Retrieved Juni 22, 2023 from kedutaan Besar Republik Korea Untuk Republik Indonesia: [https://overseas.mofa.go.kr/id-id/brd/m\\_2706/view.do?seq=756289](https://overseas.mofa.go.kr/id-id/brd/m_2706/view.do?seq=756289)
- Redaksi. (2024, Juni 6). *Indonesia accepts South Korea warship donation, despite cost concerns*”, *reuters 6 Juni 2024*. Retrieved Juni 18, 2025 from Reuters: <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-accepts-south-korea-warship-donation-despite-cost-concerns-2024-06-06/>
- Ricardo, D. (2004). *The Works and Correspondence of David Ricardo*. (P. Sraffa, & M. Dobb, Eds.) Liberty Fund.
- Syuryansyah, & Bagaskara Sagita Wijaya. (2024). *SOSIO DIALEKTIKA. IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA): AN ANALYSIS OF STRATEGIC AND ECONOMIC IMPACTS ON BILATERAL AND REGIONAL RELATIONS*, 9(2), 15-17.
- Tempo. (2019). *Indonesia-Korea Selatan memasuki Babak Baru*. Retrieved Mei 1, 2025 from tempo.co: <https://www.tempo.co/info-tempo/kemitraan-indonesia-korea-selatan-memasuki-babak-baru--695093>

- The Jakarta Post This article was published in thejakartapost.com with the title "".
- Click to read: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/03/08/40-years-friendship-s-korea-indonesia-embark-stronger-strategic-partnership.html>.
- Download The Jakarta Pos. (2013, maret 8). *40 years of friendship: S. Korea, Indonesia embark on stronger strategic partnership*. Retrieved maret 26, 2025 from TheJakartaPost: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/03/08/40-years-friendship-s-korea-indonesia-embark-stronger-strategic-partnership.html>
- Theresia. (2021). Dampak ASEAN-Korea Free Trade Area Terhadap Investasi Asing dan Wisatawan Asing di ASEAN (2015-2018). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
- Tiara, A.C. (n.d.). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terhentinya Perundingan Indonesia Korea Comprehensive Partnership Agreement (IK-CEPA) Di Tahun 2014. *andung: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP*, 91-93.
- Ulim Maidatul Chorif, & Arif Kusuma Paksi. (n.d.). South Korea's Interests behind the Reactivation of IK CEPA Negotiations with Indonesia. *Insignia: Journal of International*, 1(1).
- Vanda Kartasasmita. (2023, September 17). *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK - CEPA)*. Retrieved Desember 30, 2024 from ukmindonesia.id: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-ik-cepa>
- World Bank. (2023). *East Asia and Pacific Economic*. From <https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-and-pacific-economic-update>